

**PENERAPAN SANKSI TA'ZIR DALAM PONDOK PESANTREN
MAWARIDUSSALAM**

(Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelarsarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

NAMA : ASRIYANI HALMI

NIM : 0205163139



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri Yani Halmi

Nim : 205163139

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI TA'ZIR DALAM PONDOK
PESANTREN MAWARIDUSSALAM (Analisis
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Agustus 2020

ASRI YANI HALMI
NIM. 205163139

PENERAPAN SANKSI *TA'ZIR* DALAM PONDOK PESANTREN

MAWARIDUSSALAM

(Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

Oleh

ASRI YANI HALMI
NIM. 02.05.16.3.139

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Arifuddin Muda Harahap
NIP. 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PENERAPAN SANKSI TA'ZIR DALAM PONDOK PESANTREN MAWARIDUSSALAM (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)** telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu syariah pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 12 Agustus 2020
Panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
Medan

ketua

Sekretaris

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

M.Rizal,SH.M.Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

Annisa Sativa, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UINSU Medan

Dr. Zulham, SH.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKTISHAR

Pondok pesantren termasuk dalam lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dan memberikan sumbangsihnya terhadap pendidikan di Indonesia, dalam penerapan aturan dan sanksi didalam pondok pesantren dinamakan dengan istilah *ta'zir* seperti halnya sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam sebagai bentuk pendidikan kepada para santri agar mematuhi tata tertib aturan pesantren. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field research*. Yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu yakni (lingkungan pondok pesantren Mawaridussalam), yaitu yang berkaitan dengan ketentuan dan sanksi *ta'zir* yang diterapkan didalam pondok pesantren..

Kata Kunci: Penerapan Sanksi *Ta'zir* Dalam Pondok Pesantren , Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Asnan yang telah memperjuangkan pendidikan kami anak-anaknya hingga sampai kejenjang pendidikan perguruan tinggi dan Ibunda tercinta Hj.Halmah yang selalu menyertakan do'a kepada kami anak-anaknya agar senantiasa sehat selalu dan kebahagiaan selalu pada kami anak-anaknya.
3. Kakak dan Abang saya yang selalu nyemangati setiap saat tanpa bosan.

4. Teman-teman terdekat Dewi, Alvia, Tessa, Dilla, Winda yang selalu menyemangati setiap saat. dan pasangan saya Reza luthfi yang selalu mendukung saya sampai saat ini.
5. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Selaku Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang selalu memberi bimbingan dan support yang sangat membangun dan menjadikan mental menjadi pribadi yang disiplin bisa bersaing di dunia kerja nantinya.
8. Bapak Drs. Ishaq,M.A. Selaku Pembimbing II dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan yang selalu memberikan bimbingan dan support yang luar biasa sehingga kami para mahasiswa jinayah bisa terus menjalani studi hukum pidana Islam di jurusan jinayah dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
10. Senior dan Junior Pergerakan yang selalu mengayomi dan mendoakan penulis.

11. Seluruh staf jurusan Hukum Pidana Islam di UIN Sumatera Utara yang mendukung dan selalu mendoakan penulis agar segera menyelesaikan studi S1.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) Angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, 08 Agustus 2020

Penulis

ASRI YANI HALMI
NIM. 0205163139

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Kerangka teoritis	10
H. Hipotesis.....	15
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TA’ZIR	
A. Sistematika Fiqih Jinayah	20
B. Jarimah Ta’zir dalam Peradilan Islam	38

C. Tingkat Keefektifan Hukum	53
------------------------------------	----

BAB III HUKUMAN *TA'ZIR* DI PONPES MAWARIDUSSALAM

A. Sejarah Pondok Pesantren Mawaridussalam.....	60
B. Bentuk Aturan-aturan Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam	66
C. Penerapan dan dasar aturan Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam	70

BAB IV STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI *TA'ZIR* DI PONPES

MAWARIDUSSALAM.

A. Corak Kemaslahatan Umum dalam Jarimah Ta'zir.....	75
B. Analisis Aturan-aturan Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam	82
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam Batang Kuis Deli Serdang	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren termasuk dalam lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Bahkan sebelum adanya model pembelajaran di sekolah, pondok pesantren sudah eksis dan memberikan sumbangsihnya terhadap pendidikan di Indonesia. Bentuk pembelajaran sekolah baru ada sejak Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik pendidikan dalam bentuk *Ordonansi Sekolah Liaratau Widle School Ordonanti* yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Tujuannya, pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin dan juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut mereka berpotensi memunculkan gerakan *subversi* atau perlawanan di kalangan santri dan muslim pada umumnya. Hal seperti ini akhirnya membuat pertumbuhan dan perkembangan Islam menjadi tersendat.¹

Dalam proses pembelajarannya, pondok pesantren tidak hanya memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan *kognitif* saja, melainkan sekaligus praktek-praktek keagamaan, juga tradisi-tradisi kepesantrenan, dan juga nilai-nilai luhur keagamaan yang sudah diajarkan turun temurun dan dari masa ke masa.

Layaknya kepala sekolah di sebuah lembaga sekolah formal, dalam pesantren di kenal istilah *Kyai*, yakni seseorang yang berperan sebagai pemimpin utama dalam sebuah lembaga pesantren. Seorang *Kiyai* juga merupakan tokoh sentral yang amat disegani dalam sebuah pesantren. Semua dawuh beliau bernilai seperti titah dan amat ditaati oleh semua santri. Di tangan seorang *kiyai* lah

¹Adnan Mahdi, dkk, *Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, h: 11

penataan dan pengaturan berbagai aspek sosial, kependidikan, tata aturan diputuskan. Hal ini disebabkan karena selain *keta'dziman* seorang santri kepada kiyainya, seorang kiai selalu memiliki dasar dan pijakan keagamaan di setiap keputusan dan tindak laku yang beliau buat.

Setiap tindak laku dan keputusan yang dibuat kiyai selalu merujuk kepada hukum fiqh (*fiqh oriented*) yang sesuai *syariat* yang mana selalu memandang dengan pola “hitam-putih” atau “salah-benar” menurut Hukum Islam.²

Pondok pesantren selain sebagai tempat bagi para santri dan masyarakat dalam menimba Ilmu Agama Islam, juga merupakan tempat para santri bernaung dan membentuk suatu tatanan masyarakat tertentu dimana mereka hidup bersama dalam satu lingkungan pondok pesantren. Di tempat itulah para santri saling berinteraksi satu sama lain dengan hubungan timbal balik layaknya masyarakat di suatu negara. Keadaan ini seperti yang telah dikatakan oleh Aristoteles (384-322 sebelum M), bahwa manusia itu *Zoon Politicoon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka berasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut Makhluk Sosial.³

Jika semua tatanan yang ada di pesantren merupakan tatanan yang bernafaskan Islam, baik pendidikan, tradisi-tradisi dan rutinitas, tata cara bergaul, dan sebagainya, maka setiap Produk aturan yang ada di pesantren juga merupakan produk yang bernafaskan Islam. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah *ta'zir* dalam setiap produk aturan yang dibuat dalam pesantren. Produk aturan ini

² Izzatu Muhammad, *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 2010, hal. 1, t.d.

³ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 3

tentunya dibuat seperti aturan pada umumnya yakni sebagai sarana menjaga tata tertib dan keharmonisan hidup di pesantren. Agar dipatuhi dan diperhitungkan setiap aturan akan memuat atau paling tidak menimbulkan sanksi ketika aturan itu dilanggar baik secara positif maupun negatif. Produk aturan ini dibuat dan diberlakukan atas persetujuan kiai selaku pemimpin sebuah pesantren, kemudian yang menjalankan aturan tersebut adalah sekelompok santri pilihan kiyai yang dirasa sudah cukup berkompeten untuk mengurus kehidupan pesantren secara praktis.⁴

Atuan-aturan yang dibuat di pesantren tidaklah aturan yang rinci seperti aturan yang dibuat dalam menjalankan negara (Undang-Undang). Hal ini dapat dimaklumi karena pesantren memiliki sisi tradisional yang lebih mengutamakan nilai kesederhanaan, namun karena sisi kesederhanaan inilah aturan-aturan yang dibuat seringkali tidak menyertakan ancaman-ancaman atau sanksi yang jelas di setiap pelanggaran aturan yang ada. Hal ini justru akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penegak aturan dalam hal ini pengurus. Dan membahayakan kepastian hukum tiap warga pesantren yang melanggar. Dalam penerapan hukuman dilakukan oleh beberapa pengurus bidang keamanan mulai dari awal hingga akhir hukuman berikut pemilihan hukumannya juga. Yang juga sering menjadi objek komplain beberapa pihak termasuk wali santri adalah bentuk-bentuk hukuman yang ada yang kadang terkesan merendahkan santri yang melanggar.

⁴ Kiai akan menunjuk seorang atau beberapa murid yang dirasa sudah baik dalam keilmuan untuk membimbing dan mengelola para santri junior. Santri-santri yang dipercaya Kiai inilah yang disebut pengurus. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 51

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bukankah peraturan yang tidak begitu rinci beserta hukuman yang diancamkan akan membahayakan kepastian hukum bagi pelanggar? Dan apakah model penerapan hukuman *ta'zir* yang demikian dapat memberikan pengaruh baik (kemaslahatan) bagi keberlangsungan kehidupan di pesantren bersangkutan? Dan apakah selama ini budaya *ta'ziran* memberikan efek “patuh aturan” yang objektif bukan hanya berasal dari rasa malu pelanggarnya karena bentuk hukuman yang selama ini ada.

Adapun peran hukum pidana Islam dalam syariat merupakan sebagai tembok penghalang terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt terhadap manusia agar terjaganya hak-hak Allah (*haqullah*) dan hak-hak manusia (*haqul adamiyin*) terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan kejahatan (*jarimah*) yang menghimpun dalam aspek-aspek yang penting pada kehidupan manusia, sebagai mana menurut Imam Al-Ghazali dan Asyathibi yaitu:

1. Terjaganya akal (*hifzul al-aql*)
2. Terjaganya jiwa (*hifzul al-nafs*)
3. Terjaganya harta (*hifzul al-mall*)
4. Terjaganya nasab (*hifzul al-nashl*)
5. Terjaganya aqidah (*hifzul al-dinn*).

Dengan terjaganya aspek-aspek penting terhadap manusia tersebut maka kehidupan suatu individu akan baik, sehingga maqasid syariah pun tercapai.

Adapun *makasid syari'ah* dibagi dalam beberapa tingkatan, Yakni:

- a. Makasid Umum (*al-maqasidal ammah*): makasid ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum islam, yang mengandung aspek keadilan dan kemudahan.
- b. Makasid Khusus (*al-maqasidal al-khassah*): makasid ini dapat diobservasi diseluruh isi “bab” hukum Islam tertentu yakni dalam *furu' syari'ah* khusus seperti kesejahteraan dari segi muamalah dan munakahat. Serta keamanan dan perlindungan dalam hal kriminal.
- c. Makasid Parsial (*al-maqasidal al-Juz i'yyah*): makasid ini adalah bentuk penjelasan dari maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, yakni seperti halnya bentuk aspek pembuktian dari suatu kebenaran dan bentuk keringanan terhadap suatu ibadah sebagai bentuk alternatif untuk menjalankan ibadah.⁵

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagiannya yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok. Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum seperti yang diatas dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni *al-Jarimah* dan sedangkan *Fuqaha* (Ahli fiqh)

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach* terjemah Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem, (Medan:La Tansa Press, 2014), h. 6

menggunakan istilah *Jinayah* yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh *Syara'* baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya.⁶

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

الجرائم محظورة شريعة جزر الله تعالى عنها بحدٍّ أو تعزير⁷

“Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah Swt dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*”.

Ta'zir, merupakan sanksi hukuman yang diberikan terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang tidak dijatuhi hukuman yang ditentukan oleh *Syara'* yaitu *Jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat* sebagai bentuk *ta'dib* (Pendidikan).⁸ Terhadap pelaku *jarimah* yang di tetapkan oleh *Imam* (Pemerintah).

Menurut Abdul Qadir Audah⁹ dan Wahbah Zuhaili.¹⁰ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah dan menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan pelaku agar ia menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Tentu dalam hal ini kepala pondok pesantrenlah (*Kyai*) yang berperan sebagai *ulil amri* di pondok pesantren sebagai orang yang memeberikan peraturan terhadap para santri yang bermukim di pesantren.

Maka dimana segala macam pelanggaran yang dilakukan para santri ditangani penuh oleh pihak pengurus bagian keamanan yang berperan dalam

⁶Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah*, h. 18

⁷Abu Hasan al-Mawardi, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia :Haramain, 2015), h. 174

⁸ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 65

⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h. 197

proses penyidikan dan bahkan putusan. hukuman yang akan diberlakukan untuk si pelaku. Hukuman yang diberikan bermacam-macam mulai dari yang ringan seperti peringatan lisan, kerja bakti, digundul, berdiri dengan membaca sholawat, disiram dengan air comberan, menelan biji mahoni, mengunyah daun pepaya mentah, hingga yang berat seperti pemanggilan orang tua, dan diboyong (dikeluarkan) dari pesantren sekalipun.

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji penerapan *Ta'zir* dalam pondok pesantren, dimana Ragam hukuman seperti inilah yang seringkali mendapat kecaman dari berbagai pihak utamanya para orang tua/wali santri yang menganggap hukuman yang diberikan tidak memiliki efek mendidik atau bahkan tidak manusiawi dan hanya membuat efek memalukan bagi para santri pelaku. Maka dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukuman ta'zir di pondok pesantren dalam perspektif hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana bentuk aturan-aturan ta'zir yang diterapkan di pondok pesantren Mawaridussalam?
3. Bagaimana bentuk analisis kemaslahatan dalam penerapan *ta'zir* kepada santri di pondok pesantren Mawaridussalam perspektif hukum pidana Islam dan Pidana Positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman *ta'zir* dipondok pesantren dalam perspektif hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk aturan-aturan *ta'zir* yang diterapkan di pondok pesantren Mawaridussalam.
3. Untuk mengetahui bentuk analisis kemaslahatan dalam penerapan *ta'zir* kepada santri di pondok pesantren Mawaridussalam perspektif hukum pidana Islam dan Pidana Positif di Indonesia.

D. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni terkait Istilah *Ta'zir*, dalam hal ini *Ta'zir* diartikan sebagai aturan yang diberikan pondok pesantren sebagai sanksi pendidikan dalam upaya kedisiplinan para santri yang belajar dan bermukim di lingkungan pesantren.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum terutama mahasiswa tentang konsep bentuk sanksi tindak pidana terkait *Ta'zir* berdasarkan gender perspektif hukum pidana islam.
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu karya ilmiah tidak lahir dalam ruang yang benar-benar hampa. Artinya bahwa suatu karya ilmiah merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya

yang sudah lebih dahulu dilakukan. Maka dalam melakukan penelitian ini penulis telah menilik beberapa sumber baik berupa skripsi, ataupun jurnal yang telah meneliti objek yang sama yakni peraturan atau hukuman di pondok pesantren. Diantara penelitian tersebut adalah :

Skripsi karya Izzatu Muhammad, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Hukuman *Ta’zir* Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam “penelitian ini berusaha memaparkan dasar pelaksanaan hukuman *ta’zir* di Pondok Pesantren *An Nur* dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Titik perbedaan paling menonjol antara skripsi ini dengan penelitian saya adalah seting tempat yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian Izzatu Muhammad berusaha menjawab apakah yang menjadi dasar penerapan hukuman *ta’zir* di ponpes tersebut dan sesuai atau tidak dengan Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada aspek legalitas tata aturan dan sistem penerapan hukuman *ta’zir* yang ada berdasarkan Hukum Islam. Dapat dikatakan penelitian ini lebih spesifik dari ada penelitian Izzatu Muhammad.¹¹

Skripsi karya Muhammad Noor Rohman, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Model Pelaksanaan *Ta’zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak “ dalam skripsi ini penulis berusaha membahas model pelaksanaan *ta’zir* pada santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Walaupun sama-sama membahas mengenai penerapan hukuman *ta’zir* di sebuah pondok pesantren, tapi ada beberapa perbedaan dengan

¹¹Izzatu Muhammad “Hukuman *Ta’zir* Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam“ http://digilib.uinsuka.ac.id/view/creators/izzatu_muhammad_nim=2E_03370283=3A_=3A=3A.default.html, diakses tgl 19 April 2020 pukul 80:22 WIB.

penelitian yang akan saya lakukan. Selain perbedaan dari segi tempat penelitian, skripsi beliau khusus memaparkan tujuan dari pemberian *ta'zir* kepada santri. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berusaha meninjau produk aturan dan pelaksanaa *ta'zir* dengan Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan perbedaan mendasar terletak pada tujuan dari diadakannya penelitian.¹²

G. Kerangka Teoritis

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Maksudnya, *ta'zir* adalah hukuman atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya oleh *syara'*. Walaupun hukuman *ta'zir* jelas berbeda dengan yang lainnya (*hudud* dan *qishas diyat*), ada persamaan antar kesemuanya yakni dalam hal pendidikan (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*zajr*) sesuai dengan ukuran dosa (tindak pidana) yang diperbuat.¹³

Selanjutnya beliau memaparkan bahwa dalam hukuman *hudud*, *Qishas*, dan *diyat* sama sekali tidak terdapat pengurangan atau penambahan hukuman karena semua sudah ditentukan kadarnya oleh *syara'*, sedangkan dalam tindak pidana *ta'zir* Hukum Islam tidak menetapkan seluruh bentuknya yang tetap. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban (sistem) umum. Dalam kehidupan masyarakat, penguasa diberikan kekuasaan dapat membuat peraturan-peraturan yang melindungi kemashlahatan masyarakat umum, keamanan, dan ketertiban mereka. Tentunya semua peraturan tersebut juga disertai ancaman-ancaman

¹² Muhammad Noor Rohman “ Model Pelaksanaan Ta'zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak “ <http://eprints.walisongo.ac.id/229/>, diakses tgl 19 April 2020 pukul 09:15 WIB

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I*, (Bogor: Kharisma Ilmu), h. 145.

hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Karena itu, peran pemerintah dalam tindak pidana *ta'zir* lebih besar dari pada perannya dalam tindak pidana hudud. Namun tidak berarti Hukum Islam membiarkan pemerintah bebas secara mutlak dalam menghalalkan atau melarang sesuatu, tetapi hal itu harus selaras dengan nas-nas, dasar umum, dan jiwa Hukum Islam.¹⁴

Adapun hukuman *ta'zir* terbagi atas tiga bagian, yakni :

Pertama, hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Hukuman ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang secara dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Kedua, hukuman *ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hukuman *ta'zir* ini diberikan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang bukan karena perbuatan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, namun karena sifat dan akibatnya yang buruk bagi kemaslahatan umum di masyarakat. Ketiga, hukuman *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*mukhalafat*). Hukuman *ta'zir* diancamkan atas beberapa perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dipandang sebagai pelanggaran (*mukhalafat*) bukan maksiat.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat.

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

¹⁴ *Ibid.*, h. 146

¹⁵ *Ibid.*, h. 146

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik semisal *Tafsir at-Thabari* dan *Ruh al-Ma’ani*, hanya menyebutkan contoh *Ulil Amri* itu pada jabatan atau profesi yang dipandang krusial pada masanya. Sedangkan Tafsir al-Maraghi, yang merupakan kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini, menyebutkan contoh-contoh *Ulil Amri* itu tidak hanya berkisar pada *ahlul halli wal ‘aqdi*, ulama, pemimpin perang saja; tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, petani ke dalam contoh *Ulil Amri*. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing.¹⁶

Dalam sebuah masyarakat pesantren, kyai merupakan tokoh sentral dan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Dalam suatu pesantren kyai diibaratkan seorang raja yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorangpun santri yang atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya)

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Jilid II*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 585-586.

kecuali kyai yang memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Para santri selalu berharap agar kyai yang diikutinya merupakan sosok yang mempunyai kepercayaan kepadanya baik dalam bidang pengetahuan, kekuasaan, maupun manajemen pesantren.¹⁷ Bagi para santri yang menurut kyai sudah memiliki kematangan dalam hal keilmuan dan mampu menggali sumber-sumber referensi serta memiliki pengetahuan yang luas diwajibkan menjadi pengajar bagi kelas santri yang ada di bawahnya. Dalam sistem pesantren tercipta suatu jenjang yang didasarkan pada kematangan dalam bidang keilmuan Agama Islam. Hirarki keilmuan ini dimulai dari kyai (pemimpin pesantren), kyai muda, *asatidz*, santri senior, dan yang terakhir santri junior. Santri-santri yang sudah mumpuni inilah yang diberikan kepercayaan oleh kyai untuk mengelola manajemen pesantren. Kelompok santri inilah yang seringkali mendapat julukan pengurus. Para pengurus inilah yang berwenang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam pesantren termasuk dalam hal membuat aturan dan larangan-larangan beserta sanksi yang diancamkan. Tentunya semua aturan dan larangan tersebut harus sesuai dengan Hukum Islam yang menjadi nafas dalam kehidupan pesantren.¹⁸

Dalam suatu *kaidah fiqh* disebutkan bahwa :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَلْوَمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.¹⁹

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, h. 94

¹⁸ *Ibid.*, h. 57

¹⁹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 76

Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat.

Nabi Saw bersabda :

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”.²⁰

Dapat dipahami bahwa para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka diharuskan menjalankan wewenang (*tabdir*) mereka dengan baik. Ini sebagai wujud dari tanggung jawab sorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, memelihara kemaslahatan, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan seterusnya.

Dengan demikian, pemimpin dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan (*mashlahah*) maupun yang lebih *mashlahah* diantara hal-hal *mashlahah* lainnya. Tidak diperkenankan pemimpin memberikan keputusan berdasarkan satu pertimbangan saja walaupun itu sudah mencakup suatu *mashlahah*, melainkan harus dicari *mashlahah* yang lebih tinggi lagi kecuali dalam hal-hal tertentu.²¹

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.²² Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

²⁰ *Ibid.*,h. 76.

²¹ *Ibid.*, h. 76

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

Sehingga peneliti beranggapan permasalahan ini penting untuk diteliti guna meyakinkan mendapatkan hasil jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Adapun anggapan sementara penulis dalam penelitian ini bahwa bentuk *ta'zir* yang diberlakukan dalam peraturan pesantren merupakan hanya sanksi *ta'zir* secara bahasa yang digunakan sebagai istilah untuk pendidikan terhadap santri. Tidak secara *syara'* yang menjadi sanksi terhadap perbuatan *jarimah* (tindak pidana) yang melanggar syariat.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan analisa isi dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data-data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan. Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.²³

Sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini. Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yakni deskripsi berupa kata-kata, ungkapan, norma, atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *Field research*. Yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu yakni (lingkungan pondok pesantren Mawaridussalam), yaitu yang berkaitan

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6

dengan ketentuan dan sanksi *ta'zir* yang di terapkan didalam pondok pesantren. Tujuan umum penelitian ini adalah mengidentifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*.

2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁴ pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

3. Sumber data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, *al-Ahkam Shulthaniah* yang di karang oleh Abu Hasan al- mawardi, Al-Qur'an, Kitab- kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, dan buku-buku Hukum primer lainnya.

b. Data Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan *ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁵Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

Mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat kegiatan yang dilaksanakan oleh para santri di pondok pesantren Mawaridussalam.

b. Wawancara

Data yang diperoleh dengan cara interview atau wawancara secara langsung dengan para santri, pengajar dan para pengurus pondok pesantren Mawaridussalam.

c. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan materi dan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori kemudian menggeneralisasikan kebenaran tersebut suatu peristiwa atau data yang bersifat sama dengan fenomena yang bersangkutan, dalam hal ini penerapan *ta'zir* dalam pondok pesantren Mawaridussalam. Disamping itu, digunakan juga cara berfikir induktif yang berangkat dari data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini melihat pelaksanaan *ta'zir* sebagai sanksi pendidikan dan kemudian dianalisis dengan tinjauan hukum pidana Islam dan Pidana Positif.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan tinjauan umum seputar *ta'zir* dalam pandangan hukum pidana Islam.

Bab III bab ini berisi tentang bentuk-bentuk *ta'zir* dalam pondok pesantren Mawaridussalam.

Bab IV, bab ini mengkaji tentang bentuk analisis kemaslahatan dalam penerapan *ta'zir* kepada santri di pondok pesantren Mawaridussalam perspektif hukum pidana Islam dan Pidana Positif di Indonesia.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TA'ZIR*

A. Sistematika Fiqih Jinayah

Jinayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim mashdar* yang berasal dari kata (جنى - الذنب - يجنيه - جنائية).²⁶ Yang bermaksud memetik dosa. Jinayah adakalanya dimaksudkan pada tindak pidana atas jiwa dan adakalanya pula dimaksudkan kepada anggota tubuh, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tindak pidana disebut juga dalam bahasa Arab yakni *al-Jarimah* dan sedangkan Fuqaha (Ahli fiqh) menggunakan istilah *Jinayah* yakni suatu perbuatan yang diharamkan oleh Syara' baik terjadi pada perbuatan terhadap Jiwa, Harta atau selainnya.²⁷

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

الجرائم محظورة شريعة جزر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزير

“Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*”.²⁸

Adapun tindak pidana menurut Hukum Positif merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Indonesia: Diponegoro, tt), h. 231.

²⁷ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarrannah al- Mazahib fi al-Jinayah*, h. 18

²⁸ Abu Hasan al-Mawardi, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia :Haramain, 2015), h. 174

²⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 35

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:³⁰

فَالْجَرِيمَةُ إِذَنْ هِيَ اِثْنَيْنِ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكٌ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ التَّركُ مُعَاقِبٌ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرْعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ عَلَيْهِ.

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Bustani sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan yakni *jinayah* dan *jarimah* adalah sama.

الجريمة: الذنب و الجناية

“*Jarimah* adalah dosa dan *jinayah*”.³¹

Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi terhadap tiga pembagian yang ditinjau dari segi hukumnya yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash dan Diat, dan Ta'zir.

1. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan *jarimah* yang diancam dengan sanksi *had*. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah merupakan

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *Syara'* dan merupakan hak Allah”.³²

³⁰ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Amzah, 2016), h. 8

³² Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, h. 65

Dari definisi diatas Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ciri khas dari jarimah hudud sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata dan kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh sebab itu sanksi *had* tidak bisa gugur atas hak perorangan atau kelompok (yang menjadi korban) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Dan adapun jarimah hudud diklasifikasikan lagi menjadi beberapa pembagian jarimah, Abdul Qadir Audah jarimah hudud kedalam tujuh bagian, yaitu:³³

- a) Tindak pidana zina (*jarimah al-zina*)

Zina menurut ulama syafi'iyah sebagaimana yang dikutip Abdul Qadir Audah yakni:³⁴

الزَّيْنَةُ هُوَ اِيْلَاجُ زَكَرٍ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ شَرَعَ خَالَ مِنْ الشُّبْحَةِ مُشْتَهًى طَبْعًا

“Zina adalah memasukkan *zakar* (Penis) kedalam *faraj* (vagina) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut *tabiatnya* menimbulkan *syahwat*”.

Perbuatan *zina* itu ada dua macam yaitu zina Mukhsan dan yang bukan mukhsan. Mukhsan adalah orang yang sudah dewasa berakal sehat, dan merdeka yang memasukkan hasyafahnya (kemaluannya) atau sekedar yang terputus kemaluannya kedalam vagina dan dalam ikatan pernikahan (wanita yang sudah

³³ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 113

³⁴ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 272

menikah). Adapun bagi pezina *mukhsan* yaitu dirajam (dilempari) dengan batu yang berukuran sedang tidak batu yang kecil dan tidak pula dengan batu yang besar. Adapun pezina yang bukan *mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan maka hukumannya yakni seratus kali cambukan (*jilid*), dinamakan *jilid* karena bertemunya cambukan dengan kulit. Kemudian diasingkan selama setahun sejauh bolehnya tempat untuk mengqashar shalat dan boleh jauh lagi jika menurut keputusan imam.³⁵ Maka tidak dikenakan hukuman *had* lantaran melakukan *mukhafadzah* (homoseksual atau menjepit dzakar pada dua pangkal paha orang lain), *musahaqah* (Lesbian atau memasukkan tulang pinggul kepada vagian orang lain), dan onani dengan tangan sendiri atau tangan selain istrinya, tetapi pelaku perbuatan tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*.³⁶

b) Tindak pidana menuduh orang berbuat zina (*jarimah al-qazaf*)

Qazaf secara bahasa yang berarti *al-ramyu* (melempar). Dalam memberikan definisi qazaf Ahmad Wardi Muslich mengambil pendapat Abdurrahman Al-jaziri, yakni.

الْقَذْفُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِالزِّنَا صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“Qazaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan *zina*, baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sharih* (jelas) atau secara *dilalah* (tidak jelas/sindiran)”.

Ketika seseorang menuduh zina kepada orang lain, seperti ucapan “engkau telah berzina”, maka wajib baginya (penuduh) yaitu diganjar dengan *had* sebanyak delapan puluh kali *jilid*. sebagaimana dalam firman Allah SWT.

³⁵ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 130

³⁶ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, h. 128

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ٢٣)

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat *zina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang *fasik*"(QS, An-nuur: 23).³⁷

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa sanksi pokok dari jarimah qazaf adalah dijilid sebanyak delapan puluh cambukan dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya, dan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat persaksiannya dapat diterima apabila dia bertaubat.³⁸

c) Tindak pidana minum-minuman keras (*jarimah al-syarb*)

Asy-Syarbu (minum-minuman Keras) menurut Abdul Qadir Audah mengutip dari pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yakni³⁹

مَعْنَى الشَّرْبِ فَهُوَ شَرِبَ الْمَشْكِرِ سَوَاءً سَمِيَ خَمْرًا أَمْ لَمْ يُسَمَّ خَمْرًا وَسَوَاءً كَانَ عَصِيرًا لِلْعِنَبِ أَوْ لَأَيِّ مَادَّةٍ أُخْرَى

"Pengertian Minuman yakni minum-minuman yang memabukkan baik minuman tersebut disebut sebagai *khamr* maupun bukan *khamr*, baik dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain".

Adapun orang yang meminum-minuman arak (minuman keras) yang terbuat dari anggur yang masih basah, atau minuman memabukkan selain arak maka diberi had (si peminum), jika bagi orang yang merdeka dicambuk sebanyak empat puluh kali dan sedangkan budak di cambuk sebanyak dua puluh kali. Bagi imam boleh memberikan tambahan hukuman sebanyak delapan puluh kali cambukan. Adapun penambahan atas jumlah empat puluh bagi orang yang

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

³⁹ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 388

merdeka dan dua puluh bagi budak adalah didasarkan atas memberikan *ta'zir* (pelajaran).⁴⁰

d) Tindak pidana pencurian (*jarimah al-sirqah*)

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan *had* terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (*sirqatul suqhra*) dan pencurian berat (*sirqatul qubra*).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّخْرَى أَخْذُ مَالِ الْخَيْرِ مَالِ الْخَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.⁴¹

Dan adapun pencurian berat yakni.

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْخَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَالَبَةِ

“Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”⁴²

Pencurian yang dita'zir juga dibagi pada dua pembagian sebagai berikut.

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah.
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret

⁴⁰ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 132

⁴¹ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 401

⁴² *Ibid.*, h. 401

kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.⁴³

Apabila tindak pidana dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana pencurian maka dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang tersinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka dia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai nilai barang yang dicuri disamping dia dihukum potong tangan. Akan tetapi bila dia tidak mampu maka hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai penggantian kerugian.⁴⁴

2) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan had ini merupakan suatu yang menjadi hak mutlak dari Allah dan adapun ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (المائدة/٣٧: ٥)

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 81

⁴⁴ *Ibid.*, h. 90

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)⁴⁵

e) Tindak pidana terorisme (*jarimah al-hirobah*)

Secara etimologi, sebagaimana di kutib oleh Eldin H. Zainal dalam bukunya. Kata “Hirobah” mengandung arti merampas harta seseorang. Dengan kata lain, pengambilan harta yang disertai dengan kekerasan dan membuat ancaman korban tidak berdaya.⁴⁶

Adapun *hirobah* menurut ulama Syafi’iyah adalah

الْجَرَابَةُ هِيَ الْبُرُوزُ لِأَخْذِ مَالٍ أَوْ لِقَتْلِ أَوْ أَرْعَابٍ مُكْبِرَةً إِعْتِمَادًا عَلَى الشَّوْكَةِ مَعَ الْبُعْدِ عَنِ الْغَوَاثِ

“*Hirobah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.⁴⁷

Dari definisi yang diberikan oleh ulama syafi’iyah, *hirobah* merupakan perbuatan yang bersifat teror (menakut-nakuti) baik terdapat didalamnya unsur mengambil harta, menganiaya, dan membunuh. Dan dalam hal ini hukuman bagi pelaku *hirobah* pun berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Adapun pembagian *hirobah* itu ada empat macam yaitu⁴⁸

- a. Menakut-nakuti orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil harta

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 92

⁴⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, h. 143

⁴⁷ Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 494

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 99

Hukuman untuk jenis tindak pidana ini hirobah ini (menakut-nakuti) adalah pengasingan (an-nafyu) pendapat ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (المائدة/٣٣:٥)

“atau diasingkan dari tempat kediamannya”.(QS. Al-Maidah:33)

b. Mengambil harta tanpa membunuh

Apabila jenis hirobah hanya mengambil harta tanpa membunuh maka menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Zaidiyah hukumannya adlah dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ (المائدة/٣٣:٥)

“atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan secara silang”.(QS. Al-Maidah:33)

c. Membunh tanpa mengambil harta

Apabila pelaku hirobah hanya membunh korban tanpa mengambil hartanya maka maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan stu riwayat dari Imam Ahmad, hukunya adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuan had tanpa disalib. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Zaidiyah disamping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

d. Mengambil harta dan membunuh orang.

Apabila pelaku membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad

dari madzhab Hanafiyah, hukumannya di bunuh (hukum mati) dan salib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat dalam kasus ini, hakim boleh memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman: pertama, potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib tanpa potong tangan dan kaki, ketiga disalib kemudian dibunuh.

f) Tindak pidana keluar dari islam (*jarimah al-riddah*)

Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.

وَهِيَ شَرَعًا الرَّجْعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِنِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُكْفِرِ أَوْ
بِقَوْلٍ

“Sedangkan menurut syara’ *riddah* merupakan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan”.⁴⁹

Dari definisi tersebut riddah diartikan keluar atau pergi meninggalkan ajaran islam. Dan dalam hal ini *riddah* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam setelah menjadi seorang yang beragama islam. Dalam hal *riddah* Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/٢١٧:٢)

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah:217)

Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantran keislaman dan

⁴⁹*Ibid.*, h. 119

kemungkinan mengalami *kesyubhatan* pada dirinya. Kemudian apabila tidak mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁵⁰

“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia”

Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhan itu kepadanya sekalipun berkali-kali berbuat murtad.⁵¹

g) Tindak pidana pemberontakan (*jarimah al-baghyu*)

Baghyu secara bahasa menurut Abdul Qadir Audah adalah.⁵²

الْبَغْيُ لُغَةً طَلَبُ شَيْءٍ

“Baghyu secara bahasa artinya menuntut sesuatu”

Adapun menurut Syafi’iyah dan Hanabilah secara istilah yaitu.

الْبَغْيُ هُوَ خُرُجُ جَمَاعَةٍ ذَاتِ شَوْكَةٍ وَرَئِيسٍ مُطَاعٍ عَنِ طَاعَةِ الْإِمَامِ بِتَأْوِيلٍ فَسِدٍ

“Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang di taati, dari kepatuhan kepada kepala negara, dengan alasan (*ta’wil*) yang tidak benar”

Pemerintah tidak boleh memerangi pemberontak, sehingga pemerintah mengutus untuk bernegosiasi (*islah*) untuk bertanya apa penyebab pemberontakan mereka. Jika pemberontak itu menjelaskan bahwa bentuk pembangkangan mereka terjadi karena adanya aniaya kepada mereka maka pemerintah wajib

⁵⁰ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 560

⁵¹ Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu’in bi Syarh Quratul ‘Ain*, h. 128

⁵² Abd Qadir Audah, *Tasri’ al-Jinai a-Islamiy*, Juz II, h. 517-519

menghilangkan penganiayaan itu. Apabila mereka tidak menjelaskan sedikit pun atau mereka tidak bersedia bernegosiasi dan sudah dihilangkannya penganiayaan kepada mereka maka hendaknya pemerintah memberikan nasehat kepada mereka bahwa mereka akan dibunuh (diperangi).⁵³

2. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Jarimah qishas dan diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik kisas maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Hukum *qishas* dan *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.⁵⁴

Qishas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishas* (serupa) atau hukum *diyat* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.⁵⁵

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Qishas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan
- b. *Qishas* karena melakukan *jarimah* penganiayaan

Maksud dari macam-macam kisas adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara *qishas*. Abdul Qadir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishas*, yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja (قتل العمد)

⁵³ Muhammad Abi Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, h. 136

⁵⁴ Makhrus Munajat, *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan*, h. 13

⁵⁵ *Ibid.*, h. 28.

- b) Pembunuhan seperti sengaja (قتل شبه العمد)
- c) Pembunuhan tersalah (قتل الغطاء)
- d) Pencederaan sengaja (جرح العمد)
- e) Pencederaan tersalah (جرح الغطاء)

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. jelaslah bahwa diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. *Jarimah* yang termasuk dalam kelompok *jarimah qishas/diyat* terdiri atas lima macam. Dua *jarimah* masuk dalam kelompok *jarimah qishas* yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga *jarimah* termasuk dalam kelompok *diyat*, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi

sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *Qishas* yang dimaafkan. Terdapat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hikmah adanya hukuman *qishas* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah *qishas* dan *diyat* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan kisas

niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁵⁶

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁵⁷ dan Wahbah Zuhaili.⁵⁸ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

و تَغْزِيرُ تَأْدِيبُ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁵⁹

“*ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, h. 30

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, h. 197

⁵⁹ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap ta'zir menurut syara' sebagai berikut:

التَّغْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبْلَغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi *had syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelilah bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana.

التَّغْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ⁶⁰

“sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan jewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat *fardhu*, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil *wakaf*, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu,

⁶⁰ Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

penipuan jual beli, *riba*, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun *ta'zir* berkaitan juga dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup aspek tiga tindak pidana yakni yang Pertama, *hudud*, dan *qishas* yang ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainnya. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah *ta'zir* yakni:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah ta'zir berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (*qadzaf*). Adapun *jarimah* perzinahan yang dianjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, *khalwat*, *ikhtilat*, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain sebagainya.

Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi *ta'zir* adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.⁶¹ dan termasuk pula

⁶¹ Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersih dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi

tuduhan zina terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina dengan cara sindiran (*kinayah*) yang di berisaksi *ta'zir* menurut imam Abu Hanifah dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi *ta'zir* seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya.

2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam penggolongan jarimah ta'zir ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah

- a. *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta,
- b. Suap dan *nepotisme*,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan,
- d. Pelayanan buruk aparat pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi,
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,

- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta takaran, dan lain-lain sebagainya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ وَصَحْرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.⁶²

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

B. Jarimah Ta'zir dalam Peradilan Islam

1. Asas Legalitas dalam Jarimah Ta'zir

a. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas jika dilihat dari secara etimologis berasal dari dua kata, *asas* dan *legalitas*. Kata *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang artinya dasar, pondasi, atau juga basis. Jika kata ini digunakan dalam hal hukum, maka *asas*

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 142

dapat diartikan sebagai landasan yang dijadikan sebagai tumpuan dan alasan pendapat dalam penegakan hukum.⁶³ Kata legalitas berasal dari bahasa latin *lex* yang artinya undang-undang, atau dalam makna lain berarti sah atau sesuai aturan yang berlaku.⁶⁴ Asas legalitas dapat kita jumpai dalam pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai dasar yang pokok dalam tindak pidana, (*Principle of Legality*). Asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin berbunyi : “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”.⁶⁵

Rumusan “Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” berasal dari seorang sarjana hukum pidana Jerman Von Feurbach yang juga berhubungan dengan teori Vom Psychologischen Zwang, yaitu menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan, akan tetapi juga tentang macam pidana yang diancamkan. Menurut Moeljatno, asas legalitas disini mengandung tiga pengertian:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*);
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁶⁶

b. Urgensi Asas Legalitas

⁶³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 126.

⁶⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 21

⁶⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), h. 39

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h. 25

Kebutuhan kepada asas legalitas ini dapat kita pahami dari apa yang telah ditulis oleh Bambang Poernomo bahwa dengan segala dinamika yang telah dilewati oleh hukum pidana, maka dapat disimpulkan beberapa ajaran mengenai asas legalitas berupa :⁶⁷

- 1) Asas legalitas menitik beratkan perhatiannya pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan para penguasa. Dalam hal ini kesamaan dan kepastian hukumlah yang diprioritaskan;
- 2) Dengan asas legalitas akan diraih salah satu tujuan dari pembedaan itu sendiri yakni pencegahan perbuatan pidana. Karena dengan mengetahui sanksi yang diancamkan, masyarakat akan tahu perbuatan mana yang dilarang;
- 3) Dalam asas legalitas terkandung falsafah keseimbangan antara pembatasan hukum bagi rakyat dan penguasa. Yakni dengan diaturnya ancaman pidana, akan menghindarkan kesewenang-wenangan penjatuhan hukuman;

Asas legalitas mengajarkan bahwa perlindungan hukum lebih utama pada negara dan masyarakat dari pada individu. Artinya bukan hanya kejahatan yang menurut undang-undang saja, akan tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran membahayakan masyarakat. Hal ini agar tidak ada perbuatan jahat yang memang dirasakan merugikan dapat lolos dari tuntutan hukum.⁶⁸

c. Asas Legalitas dalam Jarimah Ta'zir

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yakni unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tersebut.

⁶⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), h. 72

⁶⁸ *Ibid.*, h. 73

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- 2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁹

Asas legalitas dalam tindak pidana *ta'zir* agak berbeda penerapannya dibandingkan dua tindak pidana yang lainnya (*hudud* dan *qishash diyat*). Titik perbedaannya yakni bahwa dalam tindak pidana *ta'zir* asas ini diperlonggar sampai batas tertentu. Corak dan kemaslahatan umum menghendaki pelanggaran ini. dan akibatnya adalah dalam tindak pidana *ta'zir* tidak memerlukan penyebutan secara gamblang mengenai macam dan corak hukumannya.⁷⁰

2. Pembagian Jarimah *Ta'zir*

a. *Ta'zir* Terhadap Perbuatan Maksiat

Hukuman *ta'zir* ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syarak.⁷¹ Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk :

- 1) Maksiat yang dikenai *hudud* dan terkadang ditambahi *kafarat*

Yang termasuk ke dalam maksiat ini adalah berbagai macam tindak pidana *hudud* dan *qisas diyat*. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jinai al-Islamiy juz II*, h. 110-111

⁷⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 57-58.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 43

hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman *ta'zir* pula.⁷²

2) Maksiat yang dikenai *kafarat*, tapi tidak dikenai hukuman *hudud*

Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan zihar.⁷³

3) Maksiat yang tidak dikenai *hudud* dan *kafarat*

Yakni maksiat yang tidak berlaku padanya *hudud* maupun *kafarat*. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya. Yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan dahulu.⁷⁴

b. *Ta'zir* untuk Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus melakukan satu diantara dua tindakan yakni: 1) Melakukan perbuatan yang menyentuh perbuatan umum, atau, 3) Perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.⁷⁵

c. *Ta'zir* Terhadap Pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan

⁷² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), h. 149-150

⁷³ *Ibid.*, h. 150

⁷⁴ *Ibid.*, h. 150

⁷⁵ *Ibid.*, h. 150

disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum.⁷⁶

3. Ancaman Hukuman dalam *Jarimah Ta'zir*

a. Hukuman Pada Badan

1) Hukuman Mati

Hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* hanya dilakukan dalam tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berat dan berbahaya saja. Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan baginya hukuman-hukuman yang selain hukuman mati;
- b) Hukuman mati harus dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan pencegahan kerusakan yang ada di muka bumi.⁷⁸

Adapun mengenai alat yang digunakan untuk eksekusi mati para ulama lebih memilih pedang karena kematian terdakwa akan lebih cepat dan menghindari penyiksaan.⁷⁹

2) Hukuman Jilid

Adapun alat yang dipakai untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang sedang (tidak besar dan tidak pula kecil). Selain itu pukulan cambuk tidak boleh

⁷⁶ *Ibid.*, h. 44

⁷⁷ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 158

⁷⁸ *Ibid.*, h. 159

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 260

mengenai bagian-bagian vital karena dapat membahayakan si terhukum. Pukulan diarahkan ke bagian punggung.⁸⁰

b. Hukuman Pada Kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penjara terbatas dan tak terbatas (seumur hidup). Beda dari kedua model ini adalah bahwa model yang pertama memiliki kurun waktu tertentu, sedangkan model kedua tidak memiliki kurun tertentu atau sampai ajal menjemput di terhukum.⁸¹

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan atas berbagai perilaku yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Dengan dijatuhkan pengasingan pada pelaku, maka diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengaruh yang dibawa oleh pelaku.⁸²

c. Hukuman Pada Harta

Hukuman semacam ini diperbolehkan oleh para ulama selama mendatangkan mashlahat. Dalam hukuman ini, harta terdakwa ditahan sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian bila memang tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasharufkan untuk kemashlahatan umum.⁸³

4. Pihak yang Berhak Menetapkan *Ta'zir*

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim atau

⁸⁰ *Ibid.*, h. 261

⁸¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14

⁸² Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 147

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 264

penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan hirarki ketiga setelah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ini berarti ketaatan kepada seorang pemimpin adalah mutlak jika dalam hal yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada pemimpin akan gugur dengan sendirinya jika pemimpin menjalankan pemerintahannya dengan dzalim dan sewenang-wenang.⁸⁴

Sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik semisal Tafsir at-Thabari dan Ruh al-Ma'ani, hanya menyebutkan contoh Ulil Amri itu pada jabatan atau profesi yang dipandang krusial pada masanya. Syaikh Nawawi Banten mengutarakan dalam tafsirnya Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Quran Al Majid, bahwa yang disebut ulil amri di sini adalah mereka para ulama *Ahli Al Halli Wa*

⁸⁴ <https://rumaysho.wordpress.com/2009/01/31/harus-tetap-taat-pada-pemimpin/> diakses pada tanggal 21 juli 2020, pukul 08:46 WIB

Al Aqdi, para amir yang benar (*Haq*) dan para wali yang adil, adapun para amir yang bathil maka tidak ada taat baginya. Kemudian di akhir tafsir ayat ini beliau menyebutkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya adalah wajib, taat kepada Ahli Ijma' adalah wajib pula, namun taat kepada para amir dan para raja kebanyakan diharamkan karena kebanyakan dari mereka memerintah dalam kedzaliman, kecuali sebaliknya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa amal para amir dan raja (pemerintah) itu harus berdasarkan fatwa-fatwa para ulama karena pada hakikatnya para ulama adalah "*al umaro*" (pemerintahnya para pemerintah) dan mereka inilah yang disebut ulil amri.⁸⁵ Sedangkan Tafsir al-Maraghi, yang merupakan kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini, menyebutkan contoh-contoh Ulil Amri itu tidak hanya berkisar pada *ahlul halli wal 'aqdi*, ulama, pemimpin perang saja; tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, petani ke dalam contoh Ulil Amri.⁸⁶

Menurut Wahbah Az Zuhaili, taat kepada Allah SWT dan Rasulnya wajib hukumnya dengan menjalankan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Seperti itu juga, wajib taat kepada pemimpin umat, *ahlul halli wal 'aqdi*, yaitu para pemimpin eksekutif umat, para ahli ijtihad dalam pembuatan kebijakan dari kalangan ulama, pemerintah, dan pemimpin.⁸⁷

Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak disebutkannya kata "taat" pada Ulil Amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah

⁸⁵ Syaikh Nawawi Al Bantani, *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Al Quran Al Majid*, Juz I, (Dar Al Ahya' Kutub Al 'Arabiyyah, Tanpa Tahun), h 165

⁸⁶ [http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-al-quran/diakses tgl 21 juli 2020 pukul 10:38 WIB](http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-al-quran/diakses%20tgl%2021%20juli%202020%20pukul%2010:38%20WIB).

⁸⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 301.

dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaedah yang sangat populer yaitu: “*La thaata li makhluqin fi ma’shiyat al-Khaliq*“. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).⁸⁸

Kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang ini dapat diperoleh dari pemilu, dari pemerintah yang sah, bahkan dapat pula berasal dari sebab mereka memiliki sifat-sifat kriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Dalam hal ini bisa dikatakan seorang ulama atau cendekiawan yang dipercaya oleh masyarakat karena pengalamannya di bidang agama dan masyarakat secara faktual memberikan mereka wewenang walau tidak secara tertulis.⁸⁹

5. Pengertian dan Tugas Lembaga Peradilan Islam (Qadha)

Secara bahasa, qadha dapat diartikan sebagai: menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum, atau membuat suatu ketetapan. Makna terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Hukum pada asalnya bermakna menghalangi atau menyegah. Qadhi dinamakan hakim karena ia menghalangi orang zalim berbuat aniaya terhadap orang lain. Menurut Muhammad Sallam Madkur, qadha disebut hakim karena ia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil. Sedangkan menurut Muhammad Sahir Arsalan, kata qadha digunakan dalam Al Quran dan

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 585-586

⁸⁹ *Ibid.*, h. 586

berkonotasi beberapa arti: 1.) sengaja, 2.) memperbaiki batas, 3.) memenuhi kehendak, 4.) melakukan suatu tugas agama, 5.) memberi perintah dan penilaian, 6.) membunuh.⁹⁰

Karena ada beberapa pengertian dari kata qadha itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Qadhi ini disebut juga hakam atau hakim. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariah dari kata qadha berarti memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik.⁹¹

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa tugas qadha (lembaga peradilan) adalah menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁹²

Putusan sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya ijtihad dan fatwa. Dalam Islam dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad (seorang yang memenuhi persyaratan), malah menurut Islam bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala. dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad, dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.

Adapun Perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim adalah, Pertama : mufti bisa menolak untuk memberikan suatu fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (qadha) tidaklah seperti itu, tapi harus memutus, artinya tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan

⁹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 177

⁹¹ *Ibid.*, h. 178

⁹² *Ibid.*, h. 178

mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada. Kedua, qadha itu dasarnya adalah fakta (kenyataan) yang dicari hakim, jadi hakim memutus berdasarkan fakta. Sedangkan fatwa itu dasarnya ilmu (pengetahuan) yakni si mufti memberi fatwa berdasarkan ilmu yang dimiliki mufti. Ketiga, apabila putusan hakim tersebut harus dituruti ataupun mempunyai daya paksa yakni negara bisa memaksakan putusan itu untuk dilaksanakan. Sedang fatwa tidak harus orang mengikutinya dan negara pun tidak campur tangan, dalam pelaksanaannya. Keempat, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi.⁹³

Para Hakim pada Masa Mujtahid-Mujtahid masa lalu, sangatlah ketat membatasi dalam hal untuk memberi fatwa, karena dikhawatirkan putusan hakim terkontaminasi dengan fatwa-fatwa yang telah diberikan. Karenanya idealnya seseorang yang menjadi hakim adalah karena panggilan nuraninya dan kegiatannya pun terbatas pada rumah dan ruang kerjanya. Itulah sebabnya sering kali kita mendengar ungkapan bahwa seorang hakim adalah manusia yang kesepian.⁹⁴

6. Unsur-Unsur Peradilan Islam

Untuk berjalannya peradilan dengan normal diperlukan beberapa unsur, para ahli menyebutkan unsur peradilan tersebut sebagai berikut:

- a. Hakim atau Qadhi, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang perdata.

⁹³ <http://www.informasi ahli.com/2016/11/pengertian-peradilan-unsur-peradilan-dan-syarat-menjadi-hakim.html>, diakses tanggal 28 juli 2020 pukul 7:53 WIB

⁹⁴ *Ibid.*,

b. Hukum, yaitu putusan yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam. Ilzam ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, sedang qadha istiqaq adalah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad.

c. Mahkum bihi, adalah suatu hak.⁹⁵ Menurut Topo Santoso, mahkum bihi adalah sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi. Hak itu adakalanya dipandang hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba, adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan bahwa hak yang merupakan mahkum bihi dikenal oleh kedua belah pihak.⁹⁶

d. Mahkum ‘alaih secara harfiah adalah orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Dalam hak-hak syara’ adalah orang yang diminta memebuhi suatu tuntutan yang dihadapkan padanya, baik sebagai tergugat, atau bukan seorang, atau banyak.

e. Mahkum lahu, adalah orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).⁹⁷

7. Syarat-Syarat Menjadi Hakim

Para ahli memberikan syarat dalam mengangkat seorang hakim, walaupun ada perbedaan dalam syarat-syarat tersebut. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Laki-Laki Merdeka

⁹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 23

⁵⁵ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 178

⁹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 23

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad, anak keil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan qishash karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.

b. Berakal (mempunyai kecerdasan)

Syarat ini disepakati seluruh ulama. Hakim harus orang yang cerdas, bijaksana, mampu memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang muskil.

c. Beragama Islam

Adapun mengapa keislaman seseorang menjadi syarat seorang hakim adalah karena keislaman adalah syarat untuk menjadi saksi atas seorang muslim, demikian jumhur ulama. Karenanya, hakim nonmuslim tidak boleh memutus perkara orang muslim.⁹⁸

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat lebih rinci, yakni membolehkan mengangkat hakim nonmuslim untuk memutus perkara orang nonmuslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula cakap menjadi hakim. Tetapi tidak pula boleh seorang kafir dzimmi memutus perkara orang muslim. Golongan Hanabilah, Syuraih, An Nakhdiy, Al Auzay'i Ibnu Mas'ud, Abu Musa, golongan Zhahiriyah, dan Imamiyah menerima saksi orang yang bukan muslim terhadap wasiat si muslim di dalam safar.⁹⁹

d. Adil

Seorang hakim harus terpelihara dari perbuatan-perbuatan haram, dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau tenang, dan perkataannya harus benar. Ada perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam hal ini. menurut pendapat Hanafi, putusan hakim yang fasik adalah sah bila sesuai dengan syara' dan

⁹⁸ *Ibid.*, h. 24

⁹⁹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 180

undang-undang. Sedang Syafi'i tidak membolehkan mengangkat seorang fasik menjadi hakim karena tidak diterimanya saksi seorang yang fasik.¹⁰⁰

e. Mengetahui Segala Macam Hukum Pokok dan Cabangnya

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang hukum agar memperoleh jalan untuk perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hanafi membolehkan muqallid menjadi hakim sesuai pendapat Imam al Ghazali karena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit dengan ketentuan telah diangkat oleh penguasa.

f. Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu

Orang bisu tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang bisu tidak menyebut putusan yang dijatuhkannya. Demikian pula orang tuli karena tidak dapat mendengar keterangan para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Syafi'i membolehkan orang yang buta, namun tetap mengakui lebih utama mengangkat orang yang sehat sebagai hakim.¹⁰¹

C. Tingkat Kefektifan Hukum

1. Perilaku Hukum

Sebelum menjawab bagaimana hukum dapat dikatakan efektif, Laurence M Friedman terlebih dahulu menguraikan pengertian perilaku hukum karena ini akan menjadi tolak ukur awal dalam menilai bagaimana hukum itu akan efektif. Perilaku hukum yakni tindakan-tindakan yang mengikuti secara kausal terkait dengan tindakan hukum (*legal act*). Secara khusus hanya perilaku yang mutlak tidak terpaksa secara fisik yang bisa digolongkan sebagai perilaku hukum. Karena itu, walaupun istilah-istilah “dengan kekuatan” dan “dengan paksaan” bertebaran

¹⁰⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 25

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 25

dalam pembahasan perilaku hukum, terutama mengenai sanksi, pada umumnya hal itu dimaksudkan sebagai ancaman penggunaan kekuatan dan paksaan, bukan kekuatan dan paksaan itu sendiri. Sistem hukum jelas menggunakan kekuatan. Disini perilaku hukum didefinisikan sebagai perilaku yang sukarela, bahkan ketika ancaman paksaan diberlakukan atas subjek.¹⁰²

Perilaku hukum tidak muncul dari faktor tunggal. Situasi yang berbeda memicu motif yang berbeda. Frederick carl von savigny menekankan pada elemen normatif dan adat kebiasaan dalam hukum. Legislasi tidak bisa mengubah adat kebiasaan secara mendalam. Namun tidak ada kelompok masyarakat yang menganut pemahaman seekstrim itu, teori-teori hukum yang menekankan peran adat dan sejarah dalam pemberlakuan hukum lebih membuktikan tentang peraturan-peraturan kuno yang nyaris universal atau peraturan-peraturan yang banyak dimuati oleh adat kebiasaan, agama, dan kultur.¹⁰³

Para ahli hukum sepakat bahwa teori tentang perilaku hukum harus bersifat majemuk; ada berbagai cara tindakan-tindakan hukum dapat mempengaruhi pikiran para subjek hukum :

- a. Sanksi-sanksi, ancaman dan janji-janji;
- b. Dunia sosial; teman sebaya;
- c. Kesadaran nurani.¹⁰⁴

2. Sanksi-sanksi

Kelsen mendefinisikan sanksi sebagai tindakan yang diberikan sebagai reaksi dari dilakukannya tindakan tertentu atau tidak dilakukannya tindakan

¹⁰² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 90

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 91

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 93

tertentu. Kelsen kemudian memberi makna pada sanksi dalam dua bentuk yang berbeda; sebagai penghukuman (dalam arti kata yang lebih sempit) dan sebagai eksekusi sipil (perdata).¹⁰⁵ Friedman mendefinisikan sanksi dengan pengertian agak berbeda dari kelsen, menurut Friedman, sanksi merupakan cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan dimana setiap peraturan mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum. Dan inilah yang dikatakan sebagai sanksi. Dari keduanya, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi merupakan tindakan reaktif terhadap ketentuan atau suatu tindakan awal. Proporsi dasar dari sanksi adalah sebagai sarana pencegahan terhadap pelanggaran, manusia pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan dan tidak sebaliknya. Friedman juga membagi sanksi ke dalam dua bentuk, yakni; imbalan dan hukuman (sanksi positif dan negatif).¹⁰⁶

Dari kedua macam pembagian sanksi tersebut (imbalan dan hukuman), terjadi perselisihan mengenai manakah bentuk sanksi yang lebih efektif. Para psikolog berkesimpulan dari sebuah studi (studi terhadap hewan dan anak-anak) bahwa hukuman (stimulus menyakitkan) tidaklah sebaik imbalan (stimulus positif) dalam merubah perilaku. Namun studi tersebut tidak mesti dapat membuktikan secara menyeluruh demikian adanya. Banyak retorika dalam tataran empiris yang menyatakan lain. Selain itu, proporsi satuan imbalan dan sanksi memiliki ukuran yang beragam tergantung bagaimana masyarakat yang mengukur.¹⁰⁷

Masih menurut Friedman, bahwa efek pencegahan dari sebuah aturan terletak pada kekuatan sebuah ancaman. Hukuman di atas kertas yang keras akan

¹⁰⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2016), h. 123

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 106

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 109

sangat lemah jika tidak memiliki kekuatan pencegahan berupa ancaman. Pencegahan selalu bergantung pada persepsi seseorang mengenai resiko bahwa suatu sanksi akan benar-benar dijatuhkan. Maka disini nilai kepastian sangat penting dalam pencegahan. Yang menjadi pencegah perilaku menyimpang bukanlah sekedar resiko riil yang akan diterima, melainkan resiko sebagaimana yang ada dalam persepsi orang.

Lebih lanjut, menurut Friedman, imbalan dan hukuman yang dibahas sejauh ini bersifat terbuka, resmi, dan langsung. Ada cara lain yang tidak resmi dalam pemberian hukuman dan imbalan ini; sebagian disengaja, sebagian laten atau tidak disengaja. Rasa malu dan penurunan martabat (stigma) merupakan bentuk-bentuk hukuman. Stigma adalah label merendahkan yang menempel pada seseorang atau sebuah kelompok, dan rasa malu merupakan keadaan batin seseorang yang terstigmatisasi. Fungsi stigma kurang lebih seperti sanksi, yakni mengandung fungsi pencegahan. Walaupun tidak selamanya dengan stigma akan diperoleh efek yang sama, karena di sebagian kasus stigma justru akan mengantarkan seseorang kepada keadaan yang sama. Dengan demikian, dari satu segi, stigma dan rasa malu dengan sendirinya bersifat terbatas. Akhirnya stigma dan rasa malu bukan sanksi yang bekerja “murni sendirian”. Stigma merupakan perpaduan dari sanksi resmi dan faktor-faktor sosial; rasa malu adalah perpaduan dari sanksi resmi dan suara batin.¹⁰⁸

3. Dunia Sosial, Teman Sebaya

Seseorang tidak mesti mau mematuhi norma-norma yang ada dalam hukum berikut pula sanksi-sanksinya, hal ini terjadi karena beberapa hal yakni:

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 129

pertama, hukum bukanlah satu-satunya sumber hukuman dan imbalan; kedua, manusia bukanlah mesin tanpa perasaan, namun entitas yang memiliki ide dan nilai-nilai; ketiga, kita tidak bisa berasumsi ketika seseorang berhadapan dengan hukum akan diam dan menerima segala konsekuensinya. Dalam kenyataan yang ketiga ini, akan muncul beberapa perilaku orang dalam menghadapi hukum; pertama, tawar menawar (interaksi), yakni upaya mereka dalam mengarahkan sanksi ke arah yang yang lain; kedua, umpan balik, yakni upaya-upaya yang dilakukan seseorang dalam menyikapi sanksi yang diperoleh; ketiga, efek samping, yakni akibat atau pelanggaran lain yang akan muncul sebagai upaya menghindari sanksi yang ada.¹⁰⁹

Manusia bukanlah makhluk yang terisolir dan hidup menyendiri melainkan tinggal dalam masyarakat, kita sebut saja kelompok sebaya (*peer group*). Dalam sebuah negara besar terdapat berbagai macam kultur, yakni banyak adat dan norma yang berbeda. Dalam masing-masing kultur memiliki imbalan dan hukuman atas berbagai macam perilaku, dan seringkali tiap-tiap kultur berjalan berlawanan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai hal yang dilarang.¹¹⁰ Kelsen menyebut keadaan ini dengan tatanan sosial. Yakni sebuah tatanan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan langsung atau tak langsungnya dengan manusia lain. Dari sudut pandang psikologis-sosiologis, fungsi dari tiap tatanan sosial adalah menghadirkan perilaku tertentu dari individu yang mematuhi tatanan sosial; untuk memotivasi individu agar tidak melakukan tindakan yang

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 140

¹¹⁰ *Ibid.*

merugikan masyarakat dan melakukan tindakan yang sebaliknya, yakni yang berguna bagi masyarakat.¹¹¹

Pluralisme kultural seringkali menyebabkan ketidakberhasilan hukum dalam penegakannya. Walaupun kultur resmi (hukum) menaikan sanksi ataupun imbalan, sedangkan kultur lain yang lebih dominan menaikan sanksi mereka pula, maka bisa dipastikan kultur resmi akan menuai kekalahan. Nyaris mustahil memberlakukan hukum yang ditolak subkultur yang kompak.¹¹² Masing-masing kultur (kelompok sebaya) memiliki hukuman dan imbalannya masing-masing. Dalam kelompok-kelompok tertentu bahkan terdapat kekuatan paksaan yang lebih yang berasal dari rasa takut. Kekuatan ini bahkan lebih efektif dibandingkan dengan tekanan yang berasal dari luar diri. Aturan ini tidak berbeda dalam efektivitasnya dengan hukuman atau imbalan dari negara.¹¹³

Ada kecenderungan tertentu yang memandang kultur sebagai faktor negatif, negara akan sangat kesulitan jikalau harus membongkar sistem adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya hukum yang menggunakan kultur dan mengambil kekuatan kultur sebagai sumbernya akan sangat efektif. Menggunakan kultur sebagai sumber hukum bukan berarti memerintahkan masyarakat agar berperilaku sesuka hati mereka, ini lebih berarti meminta mereka melakukan hal-hal baru dengan cara yang nyaman dan mudah.¹¹⁴ Selain berpotensi sebagai pesaing negara, kelompok sebaya (kultur) juga dapat menjadi pencetus adanya pemberlakuan resmi. Kasus-kasus kriminal menurut donald black seringkali “melewati saringan moral yang ada di tengah warga sebelum negara

¹¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, h. 27

¹¹² Friedman, *Sistem hukum perspektif Ilmu Sosial*, h. 140

¹¹³ *Ibid.*, h. 141

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 143

menjalankan peran sebagai penegak hukum”. Fungsi pencegahan seringkali bergantung pada kesediaan warga untuk menggerakkan hukum pidana. Dengan demikian hampir bisa dikatakan sama dengan hukum perdata yang aturannya akan tetap tidur sampai ada seseorang yang membangunkannya.¹¹⁵

4. Kesadaran Nurani

Kekuatan pokok yang ketiga yang berpengaruh pada kepatuhan adalah suara batin, kesadaran nurani, perasaan moral, hasrat untuk mematuhi, rasa kebenaran. Dalam melakukan sesuatu yang benar bisa mengacu pada sejumlah motif yang berbeda-beda walaupun saling berkaitan.¹¹⁶ Motif-motif tersebut yakni;

a. Civic Mindedness (kesadaran akan kepentingan umum)

Yakni pemahaman bahwa kita semestinya mematuhi sebuah peraturan walaupun tidak ada kepentingan kita di sana, karena hal itu baik untuk orang lain atau bagi orang lain secara keseluruhan.

b. Fairness (rasa keadilan)

Yakni gagasan bahwa suatu peraturan atau perilaku layak untuk dipatuhi, didukung, atau dipegang karena adanya kualitas formal tertentu.¹¹⁷ Kedua motif tersebut merupakan motif-motif yang tidak bergantung pada keyakinan umum pada hukum atau otoritas.¹¹⁸ Keyakinan semacam ini juga bisa menjadi motif tersendiri:

a. Trust (kepercayaan)

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 145

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 146

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 147

Yakni ide bahwa orang-orang yang memegang otoritas pasti tahu apa yang mereka kerjakan, ahli, bijaksana, dan memiliki informasi dan kebijakan yang baik.

b. Legitimate (kesahan)

Yakni kepercayaan atau keyakinan kepada struktur atau prosedur. Menurut weber, sebuah peraturan, adat, perintah, atau sistem tergolong legitimate bila di sana terkandung keistimewaan sebagai teladan dan mendorong munculnya kepatuhan.¹¹⁹ Penilaian mengenai legitimasi adalah penilaian mengenai bentuk, prosedur atau sumber mengenai bagaimana caranya peraturan dibuat atau mengenai para pembuat hukum dan otoritasnya. Legitimasi berbeda dengan kepercayaan, karena kepercayaan bersandar pada keyakinan terhadap fakta-fakta, tapi legitimasi tidak demikian.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

BAB III

HUKUMAN TA'ZIR DI PONPES MAWARIDUSSALAM

A. Sejarah Pondok Pesantren Mawaridussalam

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Mawaridussalam

Menurut Pasal 2 UU tentang Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan *muallimin*.¹²¹ Maka dari itu pesantren merupakan sebuah suatu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki peran khusus dalam pendidikan keislaman di Indonesia yang menjaga tradisi keislaman yang merujuk kepada kitab kuning (kitab berbahasa arab atau umumnya bahasa melayu jawi yang beraksara arab dan bahasa lainnya). Pendidikan pesantren berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 adalah berbentuk Diniyah Formal yakni Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur, Yang dimana bentuk pendidikan ini umum di terapkan diseluruh pesantren tradisional (salaf) di seluruh Indonesia. Namun berbeda dengan pesantren Mawaridussalam di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang memiliki metode pesantren modern seperti halnya pondok pesantren Gontor.

Awal mula berdirinya pondok pesantren Mawaridussalam merupakan hasil yang diprakarsai oleh sekelompok alumni Gontor yang sejak masa pengabdian awal telah membulatkan tekad untuk mengembangkan ponpes di Sumut,

¹²¹Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

dipertemukan oleh niat dan idealisme kepesantrenan yang sama, mereka berikrar untuk mencari solusi dan keluar dari kondisi instabilitas perkembangan ponpes di Sumatera Utara, dengan mendirikan ponpes baru yang langgeng dan abadi hingga hari kiamat, seperti cita-cita Pondok Modern Gontor Jawa Timur. Mereka adalah Ust. Drs. Syahid Marqum, S.Pd.I, MM, Ust. Drs. Basron Sudarmanto, S.Pd.I, MM, Ust. Drs. Junaidi, MM, Ust. Drs. H. Maghfur Abdul Halim, S.Pd.I, dan Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman, Lc, S.Pd.I, MM.

Sejak awal tahun 2008, kelima orang ini sering bertemu untuk evaluasi perkembangan ponpes secara umum. Di samping juga berkonsultasi, berkomunikasi memohon saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak yang mengerti betul dengan dunia ponpes, terutama kepada Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA Pimpinan Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan Drs. K.H. Sofwan Manaf Mukhayyar, M.Si Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta.

Dari diskusi panjang tersebut, mengkrucut ide untuk mendirikan ponpes di atas tanah yang dibeli sendiri oleh anak-anak Gontor. Selama anak-anak Gontor hanya ikut membesarkan ponpes milik yayasan atau wakaf orang lain, belum bisa menjamin akan ‘ketenangan batin’ anak-anak Gontor dalam mengabdikan dan berjuang di ponpes. Maka cepat atau lambat, harus disiapkan langkah hijrah untuk membangun ponpes baru.

Suatu saat Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA memotivasi, “Lebih baik kalian menjadi kepala ikan teri, daripada menjadi ekor ikan kakap. Anak-anak Gontor tidak boleh jadi robot, jadi ekor ikan kakap, bisanya hanya ikut orang, mentalnya ‘yang penting ngajar dan dapurnya ngepul’, tapi anak Gontor harus menjadi pemain kunci dalam mengembangkan ponpes”. “Di Sumut belum

ada anak-anak Gontor yang membangun ponpes dari keringatnya sendiri. Selama ini hanya ikut orang saja. Belum bisa diukur kemampuannya. Saya bangga dengan kalian”, tambahnya.¹²²

Selain ingin mewujudkan cita-cita TRIMURTI ‘seribu Gontor’ di Indonesia, langkah hijrah ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lebih mengembangkan potensi. Karena sering terjadinya reposisi guru setelah ponpes menjadi besar, yang memposisikan guru-guru hanya sebatas mengajar di kelas saja, sehingga potensi mereka tidak bisa digunakan secara maksimal. Jika fenomena ini dibiarkan saja, tentunya dapat mengikis potensi yang mereka miliki, bahkan dapat membunuh karakter mentalitas pengabdian dan spirit perjuangan yang selama ini ditanamkan oleh Gontor.

Di samping itu juga, pendirian ponpes baru ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu; pertama, rasa keprihatinan akan kondisi ponpes yang hingga saat ini belum mampu bersaing dan berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya, khususnya di Sumut. Kedua, rasa kesadaran mendalam akan belum adanya ponpes “wakaf murni” untuk umat di SUMUT dengan manajemen kenazhiran yang terbuka sesuai dengan fikih wakaf. Di SUMUT banyak kenazhiran wakaf ponpes masih dibatasi oleh hubungan keluarga dan kekerabatan, bukan karena kapasitas, kompetensi dan profesionalitas. Ketiga, besarnya potensi generasi muda Islam yang belum terdidik dengan baik dikarenakan ketiadaan Lembaga Pendidikan Islam yang qualified. Keempat, besarnya permintaan dan dukungan dari masyarakat Batang Kuis Deli Serdang dan sekitarnya untuk segera didirikan ponpes di wilayah mereka demi memenuhi kebutuhan pendidikan,

¹²²<https://mawaridussalam.ponpes.id/sejarah-pondok-pesantren-mawaridussalam/> diakses 29 Juli 2020. Pukul 12:13 WIB.

terutama pendidikan agama. Untuk itu, diambillah langkah-langkah strategis untuk mewujudkan mimpi pendirian ponpes sebagai lapangan perjuangan baru yang diinginkan sejak awal tahun 2008 hingga akhirnya terwujud pada tahun 2010.¹²³

Meski banyak orang bilang apa arti sebuah nama, namun bagi para pencetus ponpes baru ini, nama memiliki arti yang sangat penting. Di samping kita memerlukan nama yang marketable, nama merupakan ungkapan batin, sekaligus cita-cita yang kita angankan pada pendirian ponpes ini.

Pada November 2008, Ust. Basron Sudarmanto, Ust. Junaidi, Ust. H. Abdul Wahid Sulaiman dan Ust. Supar Wasesa telah membuat Akte Pendirian Ponpes dengan memilih nama MAWARIDUSSALAM. Nama ini dipilih karena memiliki arti yang dicita-citakan oleh mereka, yaitu lembaga pendidikan baru nanti harus menjadi sumber-sumber kedamaian, keselamatan dan kebahagiaan, membawa kedamaian, baik di dalam maupun dari luar kampus dan bahkan di mana saja. Hal ini terinspirasi oleh kondisi rata-rata ponpes di Sumut yang sering terjadi konflik ketika berkembang besar. Akte Pendirian tersebut belum sempat diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM karena beberapa hal.

Ketika dengan berbagai kondisi mempertemukan dan menyatukan kelima pencetus ponpes baru ini, nama MAWARIDUSSALAM ditawarkan kepada tim. Setelah mendengar penjelasan arti dan filosofi kandungannya, kelimanya secara aklamasi menerima nama MAWARIDUSSALAM sebagai nama ponpes baru yang akan dibangun.¹²⁴

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ *Ibid.*,

2. Tujuan Didirikannya Ponpes Mawaridussalam

Sebelum membicarakan tentang tujuan didirikannya pondok pesantren Mawaridussalam penulis akan menguraikan visi dan misi dari pondok pesantren Mawaridussalam.

a. Visi dan Misi Pondok Pesantren Mawaridussalam

Visi Pondok pesantren Mawaridussalam adalah menjaga kemurnian akidah dan mengharap ridha Allah SWT dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berkemampuan memelihara dan menyuburkan khazanah wakaf berlandaskan al-Qur`an, Hadis dan ajaran syariat Islam.

Sedangkan misinya adalah:

- 1) Membina sumber daya insani muslim yang beristiqomah guna mencapai derajat muttaqin.
- 2) Menjadikan Ponpes Mawaridussalam sebagai tempat beramal jariyah dengan meningkatkan gerakan infak, zakat, wakaf dan sedekah, sebagai modal melaksanakan upaya meningkatkan khazanah wakaf serta sumber daya insan muslim tersebut.
- 3) Menjadikan Ponpes Mawaridussalam sebagai sumber pengetahuan agama Islam, Bahasa al-Qur'an/Arab, ilmu pengetahuan umum yang tetap berjiwa ponpes.
- 4) Menjadikan Ponpes Mawaridussalam sebagai lembaga pendidikan yang berkhidmah kepada masyarakat, membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat.

Sedangkan tujuan pembelajaran di KMI Ponpes Mawaridussalam adalah mencetak santri mukmin muslim muhsin, taat menjalankan dan menegakkan syariat Islam, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran positif, beramal ikhlas dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara.

b. Program Pendidikan

1) *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI)

Program KMI menggunakan kurikulum Pondok Modern Gontor dengan beberapa pengembangan dan penyesuaian yang terdiri dari dua program:

- a) Kelas reguler selama 6 tahun (untuk tamatan SD/MI)
- b) Kelas Intensif selama 4 tahun (untuk tamatan SMP/MTs)
- c) Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah (MTs dan MA)

Program ini menggunakan kurikulum Departemen Agama. Untuk jenjang Madrasah Aliyah membuka dua jurusan; IPA dan IPS.

B. Bentuk Aturan-aturan Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam

Tata aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah merupakan tata aturan yang tertulis berikut ancaman sanksi yang ditimbulkan jika melanggar tata aturan. Aturan-aturan *ta'zir* tersebut dibentuk sedemikian rupa agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para santri. Meskipun aturan yang dibuat tertulis, namun format aturan dan rincian yang menyatakan bentuk-bentuk sanksi yang diancamkan masih sangat sederhana.

Ada perbedaan yang menarik antara tata aturan *ta'zir* yang ada di ponpes putra dan ponpes putri. Perbedaan ini terletak pada model sistematika tata aturan *ta'zir* dan penulisan aturan *ta'zir* yang ada dan model-model hukuman *ta'zir* yang ada pula. Pada tata aturan *ta'zir* pondok putri, tata aturan *ta'zir* dirangkum dalam

beberapa lembar tata aturan yang keseluruhannya menyatu dalam satu file tata aturan berikut model sanksi yang diancamkan. Sedangkan tata aturan *ta'zir* yang ada di pondok putra saling terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan ini malah lebih mirip dikatakan berbentuk seperti pengumuman suatu aturan yang menyebar dan tidak disatukan. Kemudian bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* terpisah dari aturan-aturan yang ada walaupun sama-sama tertulis.¹²⁵

Dari keduanya juga memiliki persamaan dalam bentuk pilihan *ta'zir* yang diancamkan. Secara umum, *ta'zir* yang dicantumkan memiliki tingkatan tersendiri berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, mulai dari yang ringan hingga yang berat sekalipun. Poin yang membedakan antara pemilihan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* antara ponpes putra dan putri adalah bahwa dalam tata aturan *ta'zir* ponpes putri lebih spesifik menyebutkan bentuk kongkret dari hukuman walaupun hanya sebagian hukumannya saja dan kemudian walaupun ada bentuk yang lain mengikuti kebijakan pengurus, sedangkan dalam tata aturan *ta'zir* yang ada di pondok putra bentuk-bentuk hukuman diklasifikasikan ke dalam ringan hingga berat namun dengan pilihan yang lebih banyak dan beragam. Pemilihan bentuk hukuman nantinya akan diputuskan oleh musyawarah singkat pengurus bidang keamanan.¹²⁶

¹²⁵ Kesimpulan dari Hasil wawancara dengan Lutfiyyah Aini salah satu pengajar aktif ponpes Mawaridussalam pada tanggal 14 juli 2020.

¹²⁶ *Ibid.*,

Berikut Ini adalah contoh aturan ta'zir di Pondok Pesantren Mawaridussalam.¹²⁷

Tabel. 1., Tata aturan ta'zir santri Putra Ponpes Mawaridussalam.

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Pulang tanpa ijin (rumah teman/kluyuran)	BERAT
2	Mencuri milik teman yang ada di lemari	BERAT
3	Membawa barang terlarang (tingkat non wajar)	BERAT
4	Berkelahi / menganiaya teman	BERAT
5	Merokok di luar lingkungan pesantren	SEDANG
6	Pulang tanpa ijin (Kabur dari Ponpes)	SEDANG
7	Membawa barang terlarang (tingkat wajar)	SEDANG
8	Keluar pondok tanpa ijin (jam larangan keluar)	SEDANG
9	Merusak barang milik teman	SEDANG
10	Merusak fasilitas umum pondok pesantren	SEDANG
11	Merokok di lingkungan pesantren	SEDANG
12	Tidak mengaji dan sekolah	RINGAN
13	Jajan di waktu jam larangan jajan luar	RINGAN
14	Tidak Sholat Jama'ah di Mesjid	RINGAN
Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.		

¹²⁷Hasil wawancara dengan Lutfiyyah Aini salah satu pengajar aktif ponpes Mawaridussalam. Pada tanggal 15 mei 2020

Tabel 2., Klasifikasi bentuk hukuman santri putra di Ponpes Mawaridussalam

NO	JENIS HUKUMAN	KATEGORI
1	Membersihkan lingkungan	RINGAN
2	Di jemur sambil membaca surah al-Qur'am	
3	Menghafal surah	
4	Di jewer	
5	Memakai pamflet tulisan "saya melanggar aturan"	
6	Penyitaan barang	
7	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada	
8	Digundul di depan umum	SEDANG
9	Denda uang	
10	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada	
11	Pemanggilan orang tua wali santri	BERAT
12	Diskors	
13	Di kembalikan kepada orang tua wali	
14	Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada	

Tabel. 3., Tata aturan ta'zir santri Putri Ponpes Mawaridussalam.

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Pulang tanpa ijin (rumah teman/kluyuran)	BERAT
2	Mencuri milik teman yang ada di lemari	BERAT
3	Membawa barang terlarang (tingkat non wajar)	BERAT
4	Berkelahi / menganiaya teman	BERAT
6	Pulang tanpa ijin (Kabur dari Ponpes)	SEDANG
7	Membawa barang terlarang (tingkat wajar)	SEDANG
8	Keluar pondok tanpa ijin (jam larangan keluar)	SEDANG
9	Merusak barang milik teman	SEDANG
10	Merusak fasilitas umum pondok pesantren	SEDANG
12	Tidak mengaji dan sekolah	RINGAN
13	Jajan di waktu jam larangan jajan luar	RINGAN
14	Tidak Sholat Jama'ah di Mesjid	RINGAN
15	Tidak Sholat Dhuha	RINGAN
16	Tidak memakai jilbab bandana	RINGAN
17	Tidak Memakai Bed nama	RINGAN
18	Tidak Memakai Bros Jilbab	RINGAN
19	Tidak Memakai Sepatu Pentofel hitam	RINGAN
20	Kaos Kaki Pendek	RINGAN
21	Santri Putri masuk lokasi santri Putra dan Sebaliknya Santri Putra Masuk ke Lokasi Santri Putri	RINGAN
Catatan : Jenis pelanggaran dan hukuman yang belum tercantum disesuaikan menurut kebijakan pengurus.		

Tabel 4., Klasifikasi bentuk hukuman santri putri di Ponpes Mawaridussalam

NO	JENIS HUKUMAN	KATEGORI
1	Membersihkan lingkungan	RINGAN
2	Tidak sholat dhuha di jemur dan membaca surah at-Taubah	RINGAN
3	Memakai anak jilbab (bandana) jika tidak ada sanksi denda	SEDANG
4	Di jewer	SEDANG
5	Kewajiban memakai betnama bila tidak maka di wajibkan membeli dua kali lipat	SEDANG
6	Memakai pamflet tulisan “saya melanggar aturan” bila tidak memakai bros jilbab	RINAGAN
7	Memakai sepatu selain warna hitam maka disita	SEDANG
8	Pemanggilan wali santri	BERAT
9	Diskorsing	BERAT
10	Dikembalikan kepada wali santri	BERAT
Selebihnya merupakan kebijakan pengurus sesuai dengan keadaan yang ada		

C. Penerapan dan dasar aturan Ta'zir di Ponpes Mawaridussalam

Aturan-aturan *ta'zir* yang selama ini ada dan berlaku di Ponpes Mawaridussalam tidak berasal dari ruang hampa, hal ini berarti bahwa aturan *ta'zir* yang selama ini ada merupakan produk dari sistem tertentu yang diadakan dan dilaksanakan selama ini. kenyataan ini juga menepis adanya prasangka bahwa aturan *ta'zir* yang ada dan diberlakukan selama ini merupakan aturan-aturan yang tidak matang dan dibuat berdasarkan hanya pertimbangan emosional saja.

Telah dijelaskan bahwa tata aturan *ta'zir* yang ada dan berlaku di Ponpes Mawaridussalam merupakan produk dari sistem tertentu. Layaknya sistem pada

umumnya, sistem ini juga terdiri dari komponen-komponen subsistem tertentu yang saling mempengaruhi satu sama lain dan menggerakkan sistem tersebut.

Berikut ini adalah penjabaran dari sistem pembuatan aturan di Ponpes Mawaridussalam :¹²⁸

- a. Inisiatif pembuatan aturan *ta'zir* dapat berasal dari santri biasa, pengurus paling bawah yakni pengurus kamar, anggota pengurus pusat, ketua pengurus pusat bidang tertentu, ketua pengurus pusat (lurah pondok), atau langsung dari pengasuh.
- b. Bila inisiatif berasal dari pengasuh, maka menurut kebiasaan yang sudah berlaku, maka aturan *ta'zir* tersebut langsung dapat diundangkan pada waktu tertentu;
- c. Bila inisiatif berasal dari pengurus, maka tahap pertama yang dilakukan adalah musyawarah internal bidang tertentu. Semisal inisiatif berasal dari pengurus bidang keamanan, maka dilakukan musyawarah di internal keamanan;
- d. Setelah musyawarah internal dilakukan di bidang masing-masing, maka dilanjutkan dalam musyawarah kumpulan pengurus berbagai bidang, atau paling tidak dengan ketua pengurus;
- e. Setelah dicapai kesepakatan mengenai aturan yang pas, maka aturan yang disepakati dimintakan persetujuan pengasuh. Disini peran persetujuan pengasuh sangat penting dalam perjalanan suatu aturan *ta'zir* yang hendak diberlakukan. Bila pengasuh tidak berkenan mengijinkan aturan tersebut, maka gugurlah aturan *ta'zir* tersebut walaupun sudah melalui berbagai

¹²⁸ Kesimpulan dari Hasil wawancara dengan Lutfiyyah Aini salah satu pengajar aktif ponpes Mawaridussalam pada tanggal 14 juli 2020.

tahapan. Namun sebaliknya, jika pengasuh mengiyakan pemberlakuan aturan *ta'zir* tersebut, maka aturan *ta'zir* tersebut dinilai sah dan dapat diberlakukan setelah diundangkan;

- f. Setelah diundangkan secara lisan, maka aturan *ta'zir* tersebut sudah berlaku secara umum dan kemudian dibuat pengumuman secara tertulisnya.
- g. Pengumuman tertulis di tempel di mading pondok dan di tiap kamar bila dirasa perlu demikian.

Demikianlah proses terbentuknya suatu aturan di Ponpes Mawaridussalam, tata urutan tersebut merupakan tata urutan baku yang biasa dilakukan selama ini. adapun dalam keadaan tertentu yang memungkinkan adanya cara lain, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan cara yang lain sesuai kondisi yang ada.

BAB IV
STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI *TA'ZIR* DI PONPES
MAWARIDUSSALAM.

A. Corak Kemaslahatan Umum dalam Jarimah *Ta'zir*

Telah disebutkan di muka bahwa salah satu kategori pembagian *ta'zir* adalah *ta'zir* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Secara sederhana kemaslahatan umum dapat diartikan sebagai kebaikan yang dirasakan secara umum oleh masyarakat. Adapun pihak yang memiliki wewenang menentukan dan menegakkan aturan *ta'zir* adalah ulil amri atau hakim yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

Kebutuhan pada sosok Pemimpin merupakan kebutuhan pokok dalam bermasyarakat. Sebuah perkumpulan masyarakat akan kacau tak beraturan tanpa adanya seorang pemimpin yang mengatur mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Begitu juga dengan seorang presiden menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.¹²⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Janganlah kamu sekalian mendekati (mengelola) harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik”.

Secara eksplisit, teks ayat di atas memang hanya berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Namun secara implisit, pesan universal yang

¹²⁹ Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

dikandungnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki posisi seperti wali yatim.¹³⁰

Imam Asy-Syafi'i mengutarakan sebuah fatwa yang berbunyi :

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.¹³¹

Fatwa tersebut beliau utarakan bersumber dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.

Sejalan dengan kaidah tersebut, terdapat kaidah lain yang memiliki pemaknaan yang melengkapi kaidah tersebut. Kaidah ini adalah yang berbunyi; *ikhtiyarul amst al fal alst al* (memilih yang representative dan lebih representative lagi). Artinya dalam mengambil kebijakan, seorang pemimpin harus memilih satu diantara kebijakan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat banyak.¹³² Aparat pemerintahan tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja, walaupun hal itu bermanfaat jika diyakini masih ada manfaat yang jauh lebih besar lagi. Kecuali apabila dalam pengambilan kebijakan itu akan berdampak pada hal-hal yang merugikan dan fatal. Kewajiban ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan prinsip kaidah dasar fiqh, yaitu

¹³⁰ Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, (Surabaya: Khalista, 2006), h 77

¹³¹ Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, tt), h. 61

¹³² Ibnu Taimiyyah, *Al siyasa al sar'iyyah fi islahi wa al ra'yah*. (Saudi Arabia: Dar Al kutub Al arabi, 1967), hal; 14

mendahulukan upaya pencegahan hal-hal yang merusak dari pada menarik kemaslahatan (*dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*).¹³³

1. Pengertian Masalahah

Telah dijelaskan bahwa dalam semua kebijakan yang diambil seorang pemimpin, ada satu hal yang harus selalu ada di sana yaitu kemaslahatan (*mashlahah*). *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah masdar dengan arti shalah yaitu manfaat atau terlepas darinya kerusakan. Adapun pengertian masalahah secara definitive antara lain dikemukakan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

المُحَفَظَةُ عَلَى مَقْصِدِ شَرْعٍ

“Memelihara tujuan syara” (dalam menetapkan hukum).¹³⁴

Adapun al-Khawarizmi mendefinisikan:

المُحَفَظَةُ عَلَى مَقْصِدِ شَرْعٍ بِدَفْعِ الْمَقْسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.”¹³⁵

Menurut Al-Syathibi tujuan dari adanya syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di

¹³³ Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, h. 76

¹³⁴ Totok Jumanto dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah), h. 200-201

¹³⁵ *Ibid.*,

akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.¹³⁶

Lebih jauh ia mendefinisikan mashlahah sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan-kepentingan, yaitu masalah yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.¹³⁷ Sedangkan menurut pandangan at-Tufi pengertian mashlahah berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari', baik berupa ibadah maupun adat. Dari definisi at-Tufi tersebut, mashlahah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syari', yakni ibadah dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.¹³⁸

Selanjutnya masih menurut At-Tufi, beliau berpendapat bahwa mashlahah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan yang sejenis, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah atau yang serupa. Karena tidak memungkinkan bagi manusia mengetahui segala hal mengenai hakekat dari ibadah kecuali apa yang telah Allah SWT sendiri perlihatkan. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya.¹³⁹

¹³⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105

¹³⁷Al-Syatibi, *al- Muwafaqat f Ushl al-Ahkam*, Juz II, (tt., t.th), h. 35-36

¹³⁸Najamuddin at Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*.(Bagian Lampiran) (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954), h, 243

¹³⁹ Munawir Sjadzali. *Islam Negara Dan Civil Societ.*. (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 358

2. Kriteria dan Pembagian Mashlahah

Telah dijelaskan bahwa mashlahah membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, sedangkan mafsadah yang merupakan kebalikannya yang membawa kemadharatan bagi manusia. Menurut jumhur ulama, kriteria *mashlahah* adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid al syariah, dalil-dalil kulli, (general dari Al Qur'an dan As Sunnah), semangat ajaran, dan *kaidah kulliyah* hukum Islam;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi;
- c. Kemaslahatan itu harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian masyarakat kecil;
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.¹⁴⁰

Para ulama ushul fiqh membagi mashlahah berdasarkan kualitas dan kepentingan kemashlahatan kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Daruriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta, kelima mashlahah ini disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.
- b. *Mashlahah al-Hajiyyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

¹⁴⁰ Al Jazuli, *Fiqih Siyash*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 53

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti dalam ibadah diberi keringanan meringkas sholat, berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu, jual beli pesanan, kerjasama alam bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kesemua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah*.

- c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, anjuran makanan bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Pembedaan mashlahah dalam tiga bagian ini bertujuan agar seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Tentunya kemashlahatan *dharuri* harus di dahulukan dari *hajiyyah* dan begitu pula kemashlahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemashlahatan *tahsiniyyah*.¹⁴¹ Al-Syathibi membagi mashlahah dari segi keberadaannya dalam tiga hal, yaitu :¹⁴²

- a. *Maslahah muktabar*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dharuri* (yang paling utama). Menurut Muhammad Kamaluddin, mashlahah ini disebut mu'tabar karena bentuk kemashlahatan ini didukung oleh syara'.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*,

¹⁴² Syatibi, *al- Muwafaqat f Ushl al-Ahkam*, h. 36

¹⁴³ Muhammad Kamaluddin, *Ahwal Al-Fiqh Al-Islami*, (Bairut, Libanon, 1996), h. 199.

- b. Masalah mulgha, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat mashlahat, tetapi ada mashlahat yang lebih besar sehingga mashlahat yang kecil itu boleh diabaikan.¹⁴⁴
- c. Masalah mursalah, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya. Dengan demikian, kekuatan mashlahah sebagai dalil dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum (*Maqashid Syari'ah*) yang berkaitan dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia tersebut, juga dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal di atas.¹⁴⁵

Al-Syathibi menganggap pembagian mashlahah sebagai struktur yang terdiri atas tiga tingkatan, yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Ia merinci analisa yang menjelaskan dua aspek dari hubungan ketiganya satu sama lain. Pertama, setiap tingkatan secara terpisah menuntut penggabungan unsur tertentu yang melengkapi tingkatan ini. Kedua, masing-masing terkait dengan yang lain dan ketiga tingkatan ini menuntut unsur tertentu untuk mencapai realisasi penuh atas tujuannya. Namun demikian, posisi ini membutuhkan dua klasifikasi: pertama, kekurangan unsur pelengkap ini tidak sama dengan peniadaan tujuan yang esensial; kedua, pertimbangan dan realisasi unsur-unsur pelengkap harus tidak mengakibatkan pengasingan tujuan orisinal; yakni jika pertimbangan atas satu unsur mengakibatkan hilangnya tujuan orisinal, maka pertimbangannya tidak akan valid. Alasan bagi persyaratan ini, pertama-tama adalah karena unsur pelengkap seperti suatu kualitas sifat. Jika pertimbangan atas suatu kualitas mengakibatkan penegasian objek yang disifati (*maushuf*) maka kualitas ini juga

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 324

dinegasikan. Kedua, seolah-olah dianggap, bahwa pertimbangan atas unsur pelengkap mengakibatkan perwujudan kepentingannya dengan mengorbankan tujuan orisinal, maka ditekankan bahwa realisasi atas tujuan orisinal ini disukai.

Situasi di atas diilustrasikan melalui contoh sebagai berikut; makan bangkai diperbolehkan menurut syariat untuk mempertahankan hidup. Alasannya adalah bahwa mempertahankan hidup merupakan kebutuhan paling penting, sedangkan memertahankan *murū'ah* (harga diri) hanyalah pelengkap (*takmil*) bagi kehidupan manusia.¹⁴⁶ Hubungan satu sama lain, dari tingkatan mashalih di atas adalah sama dengan hubungan mashalih pelengkap dengan tujuan orisinal hukum. Jadi, tahsinayat merupakan unsur pelengkap bagi *hajiyyat* dan semua merupakan unsur fundamental dari mashalih. Mengingat penjelasan di atas, Al-Syatibi mendeduksi lima ketentuan berikut mengenai hubungan ini :

- a. Daruri merupakan basis bagi segala *mashalih*;
- b. *Ikhtital* (kecacatan dan kerusakan) daruri mengharuskan *ikhtital mashalih* lain secara mutlak.
- c. Kendatipun demikian, *ikhtital mashalih* lain tidak harus berarti *ikhtital* yang berada di dalam daruri itu sendiri.
- d. Tetapi dalam kasus tertentu, *ikhtital tahsini* atau *hajiyy* mutlak berarti *ikhtital daruri*.
- e. Perlindungan (*mukhafadhoh*) atas *hajiyy* dan *tahsini* merupakan keharusan untuk mencari *daruri*.¹⁴⁷

Ketentuan-ketentuan ini bisa diilustrasikan melalui hukum *qishash*. *Qishash* merupakan *daruri* dan *tamaththul* (pertimbangan kesamaan) yang termasuk dalam

¹⁴⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 104

¹⁴⁷ *Ibid.*,

kategori tahsini dan takmili. Untuk mengilustrasikan ketentuan pertama, *tamaththul tahsini* adalah unsur pelengkap dan ada hanya dikarenakan oleh *qishash (daruri)*. Jadi, suatu *mashlahah daruri (qishash)* merupakan basis dari suatu *mashlahah tahsini*. Untuk mengilustrasikan ketentuan kedua, jika tidak ada *qisas*, tidak ada pertimbangan bagi *tamaththul*. Dengan kata lain, *ikhtilal* (kerusakan) daruri berarti harus sama bagi tingkatan mashalih lainnya. Untuk mengilustrasikan ketentuan ketiga, *ikhtilal tamaththul* tidak menuntut *ikhtilal qisas*.

Ketentuan keempat dan kelima bisa diapresiasi jika seseorang menangkap pengertian dimana daruri dipengaruhi oleh *ikhtilal mashalih* lainnya. Al-syatibi menjelaskan pengaruh mashalih lain atas mashalih daruri dengan empat kesamaan berikut:

- a. Hubungan mashalih lain dengan mashalih daruri adalah seperti hubungan zona protektif (*khima*). *Ikhtilal* salah satu zona protektif sama dengan *ikhtilal* zona selanjutnya selanjutnya sama dengan *ikhtilal mashalih daruri* yang berada di tengah zona-zona ini.
- b. Hubungan ini juga bisa dipahami sebagai hubungan bagian dengan keseluruhan. *Ikhtilal* bagian-bagian jelas berarti sama dengan *ikhtilal* keseluruhan.
- c. *Hajiyyat* dan *tahsiniyyat* bisa dipahami sebagai individu-individu dalam hubungannya dengan yang *universal*, yakni *daruriyyat*.

Hajiyyat dan *tahsiniyyat* melayani *mashalih daruri*, sebagai pendahuluan (*muqaddimah*), atau sebagai inter relasi (*muqarin*).¹⁴⁸

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 106

B. Analisis Aturan-aturan *Ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam

1. Analisis Asas Legalitas Hukuman *Ta'zir*

Aturan *ta'zir* yang diberlakukan di Ponpes Mawaridussalam merupakan aturan *ta'zir* yang tertulis dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan konsep asas legalitas yang mengharuskan adanya hukum tertulis sebagai dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut Bambang Poernomo, asas legalitas sangat urgent karena asas ini menitik beratkan perhatiannya pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan para penguasa.¹⁴⁹

Antara aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Putra dan Ponpes Putri terdapat perbedaan redaksi yang menarik untuk diperhatikan. Pada aturan *ta'zir* ponpes putri, pelanggaran dikategorikan ke dalam: ringan, sedang, dan berat. Redaksi aturan dan ancaman hukuman *ta'zir* saling berdampingan, sehingga setiap santri yang membaca aturan tersebut akan dengan mudah mengetahui ancaman hukuman apa yang menunggunya jika melanggar peraturan. Hal yang berbeda dapat dijumpai dalam redaksi aturan *ta'zir* yang ada di ponpes putra. Perbedaan ini adalah jika redaksi aturan ponpes putri dan ancaman hukuman *ta'zir*nya berdampingan, maka justru dalam aturan *ta'zir* ponpes putra terjadi pemisahan antara peraturan dan ancaman hukuman, dalam artian berbeda dalam redaksi penulisan. Aturan-aturan *ta'zir* ponpes putra dibedakan kedalam kategori ringan, sedang, dan berat. Dalam redaksi aturan yang lain dijabarkan berbagai ancaman hukuman *ta'zir* sesuai kategori berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.¹⁵⁰

¹⁴⁹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), h. 72

¹⁵⁰ Hal ini seperti yang telah penulis jabarkan dalam bentuk tabel di BAB III. Lihat di Sub BAB "Aturan-Aturan *Ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam"

Diantara berbagai ancaman hukuman yang ada, baik aturan *ta'zir* ponpes putra maupun putri, masih terdapat opsi “kebijakan pengurus” yang mana menurut penulis masih dapat menimbulkan ketidak pastian hukum bagi setiap pelanggar. Menurut Moeljatno, salah satu pengertian yang hendak disampaikan oleh asas legalitas adalah tidak diperbolehkannya analogi.¹⁵¹ Hal ini menurut penulis merupakan lampu merah bagi penegak hukum agar tidak asal-asalan dalam menentukan perbuatan yang dilarang berikut sanksi yang diancamkan. Selain itu, format tata aturan *ta'zir* yang terdapat dalam ponpes putra sangat memungkinkan untuk terjadi ketidak pastian hukum. Pasalnya redaksi ancaman hukuman *ta'zir* yang terpisah dengan redaksi aturannya akan memudahkan terjadinya perubahan ancaman hukuman secara sepihak sesuai kebutuhan pengurus. Walaupun demikian, redaksi tata aturan *ta'zir* di ponpes putra juga memiliki keuntungan, yakni kemudahan dalam merombak model hukuman ataupun aturan *ta'zir*nya tanpa merubah satu sama lain. Tentunya perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan zaman.

2. Analisis Penerapan Hukuman *Ta'zir* Ponpes Mawaridussalam

Sistematika penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam sejatinya tak jauh beda dengan penerapan tata aturan di tempat lain. Proses penanganan pelanggaran secara garis besar kurang lebihnya berupa: Penyelidikan, penyidikan, sidang pengurus bidang keamanan, musyawarah pengurus bidang keamanan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan hukuman *ta'zir*.

¹⁵¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam

Telah disebutkan bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh syara' dan diserahkan kepada hakim atau penguasa.¹⁵² Kemudian timbul pertanyaan, apakah sosok pengurus dalam suatu pesantren dapat dikategorikan sebagai penguasa atau *ulil amri*? Dalam memaknai kata *ulil amri* penulis menilik beberapa kitab tafsir baik klasik maupun moderen.¹⁵³ Keseluruhannya berkesimpulan bahwa *ulil amri* yang dimaksud dalam surat An Nisa ayat 59 bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan, melainkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Orang yang ahli dalam bidang kedokteran perintahnya harus ditaati orang yang berobat agar jalan menuju kesembuhan semaksimal mudah. Begitu pula dalam hal penerapan *ta'zir* di pesantren, bahwa sosok Ustadz/Kiyai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren yang mana seluruh perkataanya dipatuhi segenap santri. Beliaulah orang yang dipercaya mengurus berbagai aspek kehidupan di pesantren, maka beliau patut disebut *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan.

Sedangkan para pembantu beliau yakni para pengurus yang beliau beri mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan merupakan *ulil amri* pula dari pelimpahan mandat beliau. Dalam menangani berbagai perselisihan maupun aduan dari para santri, pengurus selaku wakil kiai sebagai *ulil amri* mengadakan penyelidikan dan penyidikan agar memperoleh fakta-fakta yang selanjutnya sebagai bahan membuat keputusan. Ini artinya dalam suatu masyarakat pesantren selalu diadakan proses peradilan dalam menyikapi berbagai perselisihan maupun

¹⁵² Audah, *At Tasyri' al jinai al Islami*, hal 81.

¹⁵³ Di antara kitab tafsir klasik yang penulis rujuk yakni Tafsir at-Thabari, Ruh al-Ma'ani, dan Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Quran Al Majid. Kemudian tafsir moderen yang penulis rujuk adalah Tafsir al-Maraghi, tafsir Al Misbah, dan tafsir Al Wasith. Lihat BAB II.

tindakan yang melawan hukum agama maupun aturan *ta'zir* yang berlaku. Pendapat tersebut mungkin benar jika ditinjau dari pengertian qadha (lembaga peradilan) dari segi bahasa, hal ini sesuai dengan pendapat Topo Santoso bahwa qadha (lembaga peradilan) adalah menetapkan suatu hukum agama bukan justru membuat suatu hukum lagi.¹⁵⁴

Jika dilihat dari produk yang dihasilkan berupa putusan, maka jelas produk yang dihasilkan dari proses peradilan di Ponpes Mawaridussalam bukanlah putusan sebagaimana produk peradilan (*qadha*), selain itu belum tepat pula jika disebut sebagai fatwa. Pasalnya baik putusan maupun fatwa merupakan dua hal yang dihasilkan dari proses *ijtihad*. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi syarat sebagai *mujtahid*. Selain itu seorang hakim dalam kesehariannya hanya terbatas pada rumah dan ruang kerjanya sebagai hakim, bukan dalam hal yang lain, hal ini jelas berbeda dengan seorang pengurus di pesantren yang tentunya memiliki kegiatan lain selain menangani pelanggaran aturan *ta'zir*.

Menurut kesimpulan penulis, walaupun proses penanganan perkara yang dilakukan dalam Ponpes Mawaridussalam sekilas seperti proses pada peradilan resmi (diakui negara), namun dalam kenyataannya syarat-syarat yang mengkualifikasikan sebagai suatu lembaga peradilan kurang terpenuhi. Syarat tersebut yakni kualifikasi sebagai seorang hakim yang mampu menghasilkan putusan maupun fatwa dari proses *ijtihad*. Adapun proses penanganan perkara pelanggaran aturan *ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam merupakan penegakkan aturan *ta'zir* yang mana dilakukan untuk menjaga kemaslahatan pesantren. Selain

¹⁵⁴ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h.17

itu, hukuman ta'zir memiliki fungsi berupa *ta'dib* (pendidikan) dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Sesuai dengan putusan kasasi MA nomor: 1554 K/PID/2013, tertanggal 06 Mei 2014. Diadili oleh ketua majelis hakim Salman Luthan dengan anggota Syarifuddin dan Margono. Ketiganya membebaskan Aop Saopudin atas jeratan pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang Perbuatan Diskriminasi Terhadap Anak, pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, dan pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Hal ini dikarenakan sebagai guru, Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi point penting dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Aturan *ta'zir* yang diberlakukan di Ponpes Mawaridussalam merupakan aturan *ta'zir* yang tertulis dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan konsep asas legalitas. Walaupun aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Mawaridussalam sesuai dengan asas legalitas, namun menurut penulis dalam penerapannya kurang memperhatikan asas legalitas itu sendiri. Pasalnya dalam proses penentuan hukuman masih terbuka lebar kesempatan bagi penegak aturan dalam hal ini pengurus untuk mengabaikan asas legalitas itu sendiri.

2. Dasar penerapan aturan *ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam baik putra maupun putri adalah untuk menjaga ketertiban dan suasana kondusif dalam lingkungan pesantren, sehingga pesantren dapat mengeluarkan uotput berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Tujuan ini akan tercapai dengan adanya suasana belajar yang kondusif, maka dari itu aturan *ta'zir* menjadi salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut disamping pendidikan pada umumnya.

3. Aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Mawaridussalam sudah sesuai dengan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir*. Kemudian pilihan hukuman *ta'zir* yang ada di Ponpes Mawaridussalam menurut penulis sudah relevan dengan pilihan-pilihan hukuman yang ada dalam *jarimah ta'zir*.

Sosok Ustadz/kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren yang mana seluruh perkataanya dipatuhi segenap santri. Beliaulah orang yang dipercaya

mengurusi berbagai aspek kehidupan di pesantren, maka beliau patut disebut *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan. Sedangkan para pembantu beliau yakni para pengurus yang beliau beri mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan merupakan *ulil amri* pula dari pelimpahan mandat beliau.

Adapun proses penanganan pelanggaran aturan *ta'zir* di Mawaridussalam merupakan penegakkan aturan *ta'zir* untuk menjaga kemaslahatan pesantren. Hukuman *ta'zir* di sini memiliki fungsi berupa *ta'dib* (pendidikan) dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar. Kemaslahatan yang hendak dicapai dalam penerapan hukuman *ta'zir* di Ponpes Mawaridussalam adalah terciptanya lingkungan yang kondusif bagi santri untuk belajar sehingga nantinya Ponpes Mawaridussalam dapat mengeluarkan uotput berupa lulusan yang berilmu, disiplin dan berakhlakul karimah. Selanjutnya generasi-generasi intelektual ini akan menjadi penegak nilai-nilai Islami (*hifdz al din*).

Faktor dominan efektifnya penerapan hukum *ta'zir* yang ada di Ponpes Mawaridussalam adalah faktor “Kultur Budaya”, kemudian dari kultur budaya ini terbentuklah sikap-sikap yang identik dengan kultur budayanya.

B. Saran

1. Kepada pengasuh Ponpes Mawaridussalam yang penulis hormati dan kagumi, semoga tetap diberikan kesehatan, kelapangan rizki, dan tentunya kesabaran dalam mendidik para santri. Penulis harap segenap pengasuh. bahu membahu bersama membangun Mawaridussalam dengan penuh integritas.

2. Kepada segenap jajaran pengurus baik pondok putri maupun pondok putra Mawaridussalam, agar tetap mempertahankan semua peraturan yang berdampak positif dan memperbarui beberapa peraturan yang dirasa sudah kurang relevan menyangkut sistem *ta'zir* dan sebagainya.
3. Kemudian tentunya kepada segenap santri Ponpes Mawaridussalam, agar selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan tetap menaati segala aturan yang telah dibuat. Karena semua itu tentunya dibuat untuk kebaikan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach* terjemah Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem, Medan: La Tansa Press, 2014

Audah, Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, Cairo: Daar Hadits, 2009

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid I*, Bogor: Kharisma Ilmu

Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Amir, Abdul Azis, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969

al-Mawardi Abu Hasan, *al-Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia :Haramain, 2015

ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat f Ushl al-Ahkam*, Juz II, tt., t.th

Al Jazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Djazuli, A., *Hukum Pidana Islam* Bandung : Pustaka Setia, 2000

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2015

- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2015
- Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Pidana Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatiby*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- <https://mawaridussalam.ponpes.id/sejarah-pondok-pesantren-mawaridussalam/>
- Haq, Abdul. Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, Surabaya: Khalista, 2006
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Surabaya, *Bulughul Maram terjemahan*, Mutiara Ilmu, 2012.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Amzah, 2016
- Irfan, Nurul. Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013
- Ibnu Taimiyyah, *Al siyasah al sar"iyyah fi islahi wa al ra"yah*, Saudi Arabia: Dar Al kutub Al arabi, 1967
- Jumanto, Totok dan Munir, Samsul, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah
- Kansil, Christine S.T. I, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Kamaluddin, Muhammad, *Ahwal Al-Fiqh Al-Islami*, Bairut, Libanon, 1996
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2016

- Mahdi, Adnan, dkk, *Jurnal Islamic Review "J.I.E" Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, tt
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000
- Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011
- Muhammad, Izzatu, *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Mutahhari, Murteza M., *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Nawawi Al Bantani, *Marah Al Labid Li Kasyfi Ma'na Al Quran Al Majid*, Juz I, Dar Al Ahya' Kutub Al 'Arabiyyah, Tanpa Tahun.
- Najamuddin at Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*.(Bagian Lampiran) (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Poernomo , Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Negara Dan Civil Societ.*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfa Beta, 2016

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014

Usman, Muslich, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Zainal. Eldin H., *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fi al-Jinayah)*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Jilid IV*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Asri Yani Halmi

Tempat/Tgl.Lahir : Medan/ 15 Januari 1999

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Asnan

Nama Ibu : Hj.Halmah

Alamat Rumah : Jl.M.Basir No.38 Medan Johor

B. PENDIDIKAN

1. SDN 064988 Medan Johor, Tamat Tahun 2009
2. SMPN 36 Medan, Tamat Tahun 2012
3. SMA SWASTA AL-AZHAR MEDAN, Tamat Tahun 2015
4. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Medan, 08 Agustus 2020

Penulis

ASRI YANI HALMI

NIM 02.05.16.31.39